



BUPATI TOJO UNA-UNA PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI TOJO UNA-UNA NOMOR 34 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN 2015-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOJO UNA-UNA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penanaman Modal Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2015-2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

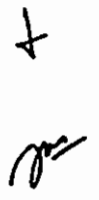
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
5. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 93);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penanaman Modal Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 7);
7. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Tahun 2015-2025 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014 Nomor : 352);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA UMUM
PENANAMAN MODAL KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN
2015-2025.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Penanaman modal daerah adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun oleh penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Kabupaten Tojo Una-Una dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia.
 2. Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Tojo Una-Una yang selanjutnya disingkat RUPMK adalah Dokumen Penanaman Modal ditingkat Kabupaten Tojo Una-Una yang berlaku pada tahun 2015-2025.
 3. Pemberian insentif adalah dukungan dari pemerintah daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
 4. Pemberian kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari pemerintah daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
 5. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.
- 

6. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Bupati adalah Bupati Tojo Una-Una.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
9. Badan adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan penanaman modal daerah.

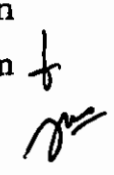
Pasal 2

- (1) RUPMK merupakan dokumen perencanaan penanaman modal jangka panjang Daerah yang berlaku dari Tahun 2015 sampai dengan tahun 2025.
- (2) RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah menjadi acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun kebijakan terkait dengan kegiatan Penanaman modal daerah.
- (3) RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi untuk mensinergikan pelaksanaan seluruh kepentingan sektoral agar tidak tumpang tindih dalam penetapan prioritas.

Pasal 3

- (1) Materi RUPMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Asas dan Tujuan;
 - c. BAB III : Visi dan Misi;
 - d. BAB IV : Arah Kebijakan Penanaman Modal;
 - e. BAB V : Peta Panduan (Road Map) Implementasi RUPM; dan
 - f. BAB VI : Pelaksanaan.
 - g. BAB VII : Penutup
- (2) Dokumen RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Badan melakukan identifikasi dan menyusun prospek potensi serta memasarkan potensi penanaman modal daerah sesuai dengan RUPMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
 - (2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam merealisasikan penanaman modal daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah dan mengkoordinasikan lintas sektor dalam realisasi pelaksanaan penanaman modal daerah.
- 

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kebijakan RUPMK, Pemerintah Daerah memberikan fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada arah kebijakan penanaman modal daerah.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan RUPMK dievaluasi secara berkala oleh Kepala Badan dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali setiap 2 (dua) tahun.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati.

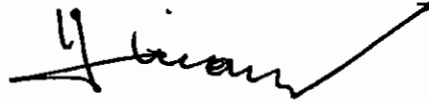
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

Ditetapkan di Ampana
pada tanggal 23 Agustus 2016

BUPATI TOJO UNA-UNA,



MOHAMMAD LAHAY

PARAF KOORDINASI	
PEJABAT	PARAF
Kemdag	
BAP DENA	

DOKUMEN RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL 2015-2025

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Secara nasional pemerintah telah menetapkan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) berupa dokumen perencanaan penanaman modal jangka panjang yang berlaku sampai dengan tahun 2025. RUPMN ini menjadi acuan bagi lembaga pemerintah nonkementerian dan pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan dasar yang terkait dengan kegiatan penanaman modal.

Dalam pelaksanaan kebijakan penanaman modal, pemerintah dan pemerintah daerah memberikan fasilitas, kemudahan dan atau insentif penanaman modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam RUPM Nasional ini terdapat tujuh elemen utama arah kebijakan penanaman modal meliputi Perbaikan iklim penanaman modal; Mendorong persebaran penanaman modal; Fokus pengembangan pangan; Infrastruktur dan energi ; Penanaman modal yang berwawasan lingkungan; Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK); Pemberian fasilitas, kemudahan dan/intensif ; promosi penanaman modal.

Selain pada 7 (tujuh) aspek yang menjadi fokus pengembangan investasi, dalam implementasinya terdiri empat fase pelaksanaan penanaman modal dalam RUPMN yaitu **pertama** mendorong kelompok industri yang cepat menghasilkan bahan baku atau setengah jadi bagi industri lainnya, penunjang infrastruktur. Fase **kedua** fokus pada percepatan pembangunan infrastruktur fisik, diversifikasi dan konversi energi serta peningkatan kualitas SDM, **ketiga** pengembangan industri skala besar yang terintegrasi, dan fase **keempat** pengembangan investasi berteknologi tinggi maupun inovasi teknologi tinggi.

RUPM nasional ini memiliki visi "Penanaman Modal yang Berkelanjutan Dalam Rangka Terwujudnya Indonesia yang Mandiri, Maju dan Sejahtera", sementara RUPMN memiliki tiga misi yaitu membangun iklim penanaman modal yang berdaya saing, mendorong diversifikasi dan peningkatan kegiatan ekonomi yang bernilai tambah, serta mendorong pemerataan ekonomi.

Dalam RUPM ini disebutkan, perlunya lembaga koordinasi penanaman modal kementerian teknis/sektor terkait, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota memiliki visi yang sama mengenai pembagian urusan pemerintahan di bidang penanaman modal, pelimpahan dan pendelegasian kewenangan di bidang penanaman modal, serta koordinasi yang efektif di antara lembaga-lembaga tersebut.

Pemerintah mendorong pembangunan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PSTP) di bidang penanaman modal yang lebih efektif dan akomodatif terhadap penanaman modal dibandingkan dengan sistem-sistem perizinan sebelumnya. Hal ini akan memberikan suatu kepastian dan kenyamanan berusaha, sehingga mendukung iklim penanaman modal yang kondusif.

RUPM Nasional juga menegaskan, agar adanya pengaturan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal berdasarkan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional, serta kepentingan nasional lainnya.

Sementara bidang usaha yang terbuka ditetapkan dengan kriteria kepentingan nasional, yaitu perlindungan sumber daya alam, perlindungan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, pengawasan produksi dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, peningkatan partisipasi modal dalam negeri, serta kerjasama dengan badan usaha yang ditunjuk oleh pemerintah.

RUPMN sebagai rujukan dalam penyusunan RUPM Prov/Kab/Kota ini juga mendorong persebaran penanaman modal dengan pengembangan sentra-sentra ekonomi baru di luar Pulau Jawa; pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal yang mendorong pertumbuhan penanaman modal di luar Pulau Jawa; pengembangan pusat-pusat pertumbuhan strategis melalui pendekatan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan pengembangan Koridor Ekonomi Indonesia (KEI); pengembangan sumber energi yang bersumber dari energi baru dan terbarukan di luar Pulau Jawa; dan percepatan pembangunan infrastruktur di luar Pulau Jawa dengan mengembangkan pola Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) dan non KPS.

RUPM juga menetapkan bidang pangan, infrastruktur dan energi sebagai isu strategis yang harus diperhatikan dalam pengembangan kualitas dan kuantitas penanaman modal. Arah kebijakan pengembangan penanaman modal pada bidang pangan, infrastruktur dan energi harus selaras dengan upaya pembangunan ekonomi berkelanjutan, mandiri, serta mendukung kedaulatan Indonesia.

Sasaran penanaman modal bidang pangan dilakukan untuk mewujudkan: i) swasembada beras berkelanjutan; ii) swasembada dan pengekspor jagung berdaya saing kuat; iii) mengurangi ketergantungan impor dan swasembada kedelai; iv) swasembada gula berkelanjutan; dst.

Berdasarkan hal tersebut, maka pemerintah daerah Kabupaten Tojo Una-Una yang memiliki potensi kekayaan alam yang cukup berlimpah perlu menyambut dan mempersiapkan penanaman modal secara matang melalui penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) tingkat Kabupaten sebagaimana yang tertuang pada Pasal 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Rencana Umum Penanaman Modal

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan RUPM Kabupaten Tojo Una-Una ini adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Provinsi Sulawesi Tengah;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- e. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal;
- f. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- g. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota ;
- h. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penanaman Modal Daerah;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penanaman Modal Daerah;
- j. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Tahun 2015-2025.

1.3 Urgensi RUPM Kabupaten Tojo Una Una

Potensi sumberdaya daerah harus dikelola dengan baik untuk memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi seluruh rakyat di daerah tersebut. Peran pemerintah di dalam upaya peningkatan kesejahteraan adalah merangkul seluruh stakeholder potensial untuk secara bersama-sama memanfaatkan sumber daya yang tersedia, meningkatkan nilai tambah dan memelihara ketersediaan serta keseimbangan dalam memanfaatkannya.

Proses pembangunan yang dilakukan pemerintah telah dilakukan melalui alokasi dana pemerintah pada seluruh sektor pembangunan yang dimaksudkan untuk meningkatkan derajat kehidupan masyarakat. Namun demikian peran pemerintah yang diwujudkan dalam bentuk mengalokasi seluruh pendanaan yang tersedia dirasakan belum secara maksimal memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Potensi-potensi ekonomi yang ada belum seluruhnya terkelola dengan baik dari seluruh investasi pemerintah, oleh karenanya sangat penting membangun sebuah sistem dalam rangka mengakomodasi seluruh stakeholder dalam proses investasi daerah. Pada sisi yang lain sistem tersebut harus mampu menyeleraskan kepentingan pemerintah pada satu sisi dan kepentingan investor pada sisi yang lain. Disinilah pentingnya pemerintah daerah dalam membangun rencana umum penanaman modal daerah sebagai *blue print* pembangunan daerah melalui proses penanaman modal jangka panjang. Terlebih lagi peluang pengembangan investasi di daerah sangat kuat ditengah upaya pemerintah pusat mendorong investasi industri ke luar pulau Jawa, penguatan peluang mendirikan industri di daerah penghasil SDA serta upaya penguatan ekonomi di kawasan Timur Indonesia melalui koridor ekonomi Indonesia kawasan timur.

1.4 Sistematika Penulisan RUPM

Sistimatika penulisan Rencana Umum Penanaman Modal di Kabupaten Tojo Una-Una mengikuti tata urutan sesuai Peraturan Presiden nomor 16 Tahun 2012

- BAB I Pendahuluan;
- BAB II Asas dan Tujuan;
- BAB III Visi dan Misi;
- BAB IV Arah Kebijakan Penanaman Modal, yang terdiri dari:
 - 1. Perbaikan Iklim Penanaman Modal;
 - 2. Persebaran Penanaman Modal;
 - 3. Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, dan Energi;



4. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (Green Investment);
5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK) ;
6. Pemberian Fasilitas, Kemudahan, dan/ atau Insentif Penanaman Modal;
7. Promosi Penanaman Modal.

BAB V Peta Panduan **(Roadmap)** Implementasi Rencana Umum Penanaman Modal, yang terdiri dari:

1. Fase Pengembangan Penanaman Modal yang Relatif Mudah dan Cepat Menghasilkan;
2. Fase Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Energi
3. Fase Pengembangan Industri Skala Besar; dan
4. Fase Pengembangan Ekonomi Berbasis Pengetahuan

BAB VI Pelaksanaan

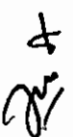
BAB VII Penutup

BAB II AZAS DAN TUJUAN

2.1. Azas RUPM

Rencana Umum Penanaman Modal merupakan *blue print* pengelolaan investasi daerah Kabupaten Tojo Una Una dalam jangka panjang yang akan memberikan dasar bagi pengambilan kebijakan selanjutnya kaitannya dengan pengelolaan investasi, baik investasi domestik maupun investasi asing. Sehubungan dengan proses investasi umumnya bersifat jangka pendek, menengah maupun panjang, maka RUPM harus memberikan ruang keberlangsungan proses investasi yang memberikan mutual benefit, baik kepada pemerintah maupun para investor.

Proses investasi yang baik akan dimulai dengan adanya instrumen investasi yang baik pula, sehingga setiap akibat yang timbul di masa depan akan memiliki dasar hukum sebagai pijakan seluruh pihak yang terkait dengan investasi. Untuk itu, RUPM harus memberikan kekuatan pada sistem investasi yang di landaskan pada beberapa azas sebagai berikut:



1. Kepastian hukum

Azas kepastian hukum diperlukan dalam menyusun kerangka kerja pengembangan investasi daerah. Daerah dengan perangkat hukum yang kuat akan menjadikan daerah memiliki kepastian berusaha, baik bagi pengusaha domestik, terlebih lagi pengusaha asing. Kepastian hukum ini dapat melibatkan berbagai aspek seperti kepemilikan lahan investasi, adanya kepastian hubungan yang harmonis antara pengusaha dan lingkungan bisnisnya sehingga mengurangi potensi konflik masyarakat dengan investor.

2. Azas keseimbangan

Proses investasi harus diarahkan untuk pengelolaan sumber daya yang ada di daerah yang kemanfaatannya harus bersifat jangka panjang. Untuk itu perlu penguatan azas keseimbangan antara proses eksploitasi dengan konservasi lingkungan. Pemanfaatan SDA yang melimpah akan memberikan manfaat dalam jangka panjang jika konsep pengelolaan berimbang di kedepankan dalam proses pengelolaan investasi SDA.

3. Asas keterlibatan.

Investasi pada hakikatnya adalah meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan seluruh sumber daya baik sumber daya alam, sumber daya manusia maupun sumberdaya buatan lainnya. Sehubungan dengan masyarakat sebagai subyek yang akan di tingkatkan kesejahteraannya, maka peningkatan keterlibatan masyarakat penting untuk dicanangkan. Keterlibatan ini dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga keberadaan investasi di daerah merupakan sebuah kebutuhan, saling memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar, serta adanya hubungan mutual benefit dalam jangka panjang yang tercipta secara harmonis. Penguatan hubungan melalui keterlibatan sesuai peran dan bidang masing masing di level pemerintahan maupun masyarakat akan menjadikan iklim investasi kondusif. Masyarakat menjadi bagian penting dalam proses investasi sehingga ia menjadi bagian dari penerima manfaat, oleh karenanya sikap ini akan melahirkan masyarakat yang peduli akan investasi dan menjadi aset investasi daerah.

4. Azas peran

Pengelolaan investasi melibatkan peran yang berbeda antara pemerintah dengan investor. Keduanya sering memiliki konsep dan tujuan spesifik yang berbeda. Olehkarenanya penting untuk membangun kesepahaman bahwa keduanya memiliki peran yang berbeda untuk tetap dapat menjalankan

hubungan yang harmonis dalam investasi. Pemerintah sebagai regulator pembangunan memiliki peran dalam mensupervisi aktivitas investasi secara umum, mengambil peran sebagai mediator jika terjadi konflik dan melakukan revitalisasi berbagai aturan yang terkait dengan aspek hukum seperti renegotiasi, merubah perangkat hukum dan sebagainya. Meskipun demikian peran yang dominan oleh pemerintah tidak harus menciptakan kerugian baik kepada masyarakat maupun investor. Investor juga memiliki peran yang penting dalam membangun ketatan terhadap regulasi, memberikan penguatan bagi implementasi aturan investasi bahkan perlu untuk memberikan penguatan bagi implementasi sistem pengelolaan investasi yang akuntabel kepada pemerintah.

2.2. Maksud Dan Tujuan

Tujuan dari Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Tojo Una-Una adalah:

1. Memberikan gambaran umum tentang Potensi Penanaman Modal Kabupaten Tojo Una-Una
2. Menetapkan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Tojo Una-Una

2.3. Manfaat

Manfaat dari Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Tojo Una-Una adalah:

1. Sebagai bahan masukan bagi para pengambil kebijakan dalam merumuskan berbagai langkah kerja yang tepat berkaitan dengan pengembangan Penanaman Modal di Kabupaten Tojo Una-Una.
2. Tersedianya dokumen perencanaan pengembangan investasi daerah Kabupaten Tojo Una Una sebagaimana yang di amanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal dimana setiap propinsi dan kabupaten harus memiliki RUPM sebagai wujud kesiapan daerah dalam membangun sistem dan pengelolaan investasi serta target capaiannya.

BAB III

VISI DAN MISI RUPM KABUPATEN TOJO UNA UNA

3.1 Visi

Visi adalah sesuatu yang diharapkan dan yang dicita-citakan. Dalam kenyataan hal itu bisa saja tidak terwujud karena beberapa faktor. Namun demikian visi itu bukan juga sesuatu yang tidak dapat dicapai, karena penyusunan visi dilakukan berdasarkan kemampuan dan peluang yang ada dengan melihat perkembangan aktual yang terjadi.

Dalam penetapan visi pengembangan penanaman modal di Kabupaten Tojo Una-Una, tentunya tidak akan lari dari visi dan misi yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam pembangunan daerah Kabupaten Tojo Una-Una. Adapun visi Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016 – 2021 adalah:

TERWUJUDNYA MASYARAKAT TOJO UNA-UNA YANG HEBAT DI BIDANG PERTANIAN, PARIWISATA DAN KEMARITIMAN

Adapun pencapaian visi di jabarkan dalam misi pembangunan Kabupaten Tojo Una-Una adalah sebagai berikut:

1. Membangun keberdayaan rakyat serta penataan wilayah perdesaan secara merata, mandiri dan berkelanjutan yang berbasis ekonomi pertanian, pariwisata dan kemaritiman
2. Mewujudkan kelembagaan birokrasi yang bersih efisien, efektif, dan akuntabel
3. Mewujudkan pengembangan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing.
4. Mewujudkan pengarusutamaan gender dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya masyarakat
5. Mengembangkan kemitraan usaha lokal, investasi dan pengembangan infrastruktur

Berdasarkan visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Tojo Una-Una 2016-2021 tersebut, terlihat bahwa besarnya komitmen pemerintah daerah dalam upaya mendorong pertumbuhan investasi daerah yang di tuangkan dalam misi-misi tersebut. Hal ini sangat beralasan manakala pemerintah ingin memacu pertumbuhan ekonomi melalui penanaman modal di daerah yang berorientasi pada pemanfaatan potensi daerah seperti setor pertanian, pariwisata dan kemaritiman.

Selain itu pengembangan penanaman modal merupakan salah upaya pencapaian tujuan ekonomi daerah melalui peningkatan nilai tambah (*value added*) dari pengelolaan potensi ekonomi di Kabupaten Tojo Una-Una. Berdasarkan kondisi

potensi dan arah pengembangan pembangunan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah yang tertuang dalam visi dan misi pembangunan Kabupaten Tojo Una-Una, maka sebagai bentuk arahan dalam Rencana Umum Penanaman Modal di Kabupaten Tojo Una-Una perlu dirumuskan visi sebagai berikut :

“MEWUJUDKAN KABUPATEN TOJO UNA-UNA SEBAGAI KABUPATEN TUJUAN INVESTASI YANG BERDAYA SAING DAN BERFOKUS PADA PENINGKATAN NILAI TAMBAH SUMBERDAYA YANG BERKELANJUTAN

Berdasarkan visi Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Tojo Una Una tersebut di atas maka dapat dijelaskan beberapa makna spesifik yang termaktub di dalamnya yaitu :

- **Kabupaten Tojo Una-Una sebagai Tujuan Investasi yang Berdaya Saing** adalah usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk menciptakan daya tarik bagi investor melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif
- **Berfokus Pada Peningkatan Nilai Tambah Sumberdaya** adalah peningkatan investasi yang diarahkan pada pengolahan seluruh sumber daya yang tersedia secara optimal
- **Berkelanjutan** adalah upaya pemerintah dalam mewujudkan investasi yang berimbang dengan daya dukung lingkungan secara berkelanjutan.

3.2 MISI

Pernyataan misi merupakan hal yang sangat penting untuk dapat terus eksis. Dengan misi, dapat ditetapkan sasaran utama yang harus dicapai oleh organisasi, sehingga tidak ada keraguan bagi segenap komponen organisasi. Misi mengandung aktivitas organisasi, memberikan gambaran tentang citra yang ingin diproyeksikan agar dikenali dan diketahui oleh berbagai pihak yang berkepentingan, mencerminkan pandangan organisasi tentang dirinya sendiri dan bidang aktivitas yang ditekuni. Dengan demikian misi merupakan maksud dari kegiatan utama yang membuat organisasi memiliki jati diri dan sekaligus membedakannya dari organisasi lain

Berdasarkan visi yang telah diuraikan di atas, maka misi Rencana Umum Penanaman Modal di Kabupaten Tojo Una Una sebagai berikut :

1. **Penciptaan Iklim Pertumbuhan Dan Peningkatan Kuantitas Penanaman Modal**
2. **Penciptaan Kawasan-Kawasan Pengembangan Investasi Dalam Suatu Tata Ruang Wilayah Strategis**
3. **Mendorong Peningkatan Investasi Khususnya di sektor primer untuk mendukung ketahanan pangan dan penguatan bahan baku industri**
4. **Memperluas promosi dan Jaringan Kerjasama dan Investasi Dengan Berbagai Stakeholder.**

BAB IV
ARAH KEBIJAKAN
PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN TOJO UNA-UNA

Arah kebijakan penanaman modal di Kabupaten Tojo Una-Una harus sesuai dengan RUPM Nasional yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota. Di samping itu, arah kebijakan harus menopang rencana pembangunan jangka panjang (RPJMD) Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2021. Arah kebijakan yang disusun dalam dokumen ini pada dasarnya berusaha untuk memantapkan visi tersebut. Terutama dalam mewujudkan terciptanya daerah tujuan investasi.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una perlu mengacu kepada Rancangan Umum Penanaman Modal Nasional sehingga terbangun keterpaduan dan konsistensi arah perencanaan penanaman modal Nasional dengan pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una sehingga sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal yang menjadi tujuh arah kebijakan penanaman modal di Kabupaten Tojo Una-Una yaitu sebagai berikut:

1. Perbaikan Iklim Penanaman Modal;
2. Persebaran Penanaman Modal;
3. Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur dan Energi;
4. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (Green Investment);
5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK);
6. Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan Insentif Penanaman Modal; dan Promosi Penanaman Modal

4.1 Arah 1 : Perbaikan Iklim Penanaman Modal

Konsep pengembangan penanaman harus didukung oleh iklim yang memadai yang memastikan bahwa calon investor merasa aman untuk memulai usaha dan terdapat lingkungan yang kondusif bagi tumbuhnya modal dalam jangka panjang. Upaya membangun iklim penanaman modal akan dipengaruhi oleh berbagai faktor esensial, diantaranya adalah kepastian hukum yang mendukung keberlanjutan usaha, kelembagaan penanaman modal daerah, peraturan tentang usaha, tingkat persaingan usaha, kondisi hubungan industrial dan sistem perpajakan dan kepastian

Upaya penciptaan iklim juga harus melibatkan masyarakat secara luas karena masyarakat umumnya akan menjadi pasar, penyedia Tenaga Kerja, menjadi Supllier perusahaan. Masyarakat yang *aware* dalam kegiatan investasi adalah mereka yang memiliki persepsi positif atas manfaat investasi, sehingga investor dipersepsikan sebagai mitra dalam membangun usaha, membangun hubungan yang saling menguntungkan dan bagian dari proses untuk menciptakan nilai tambah yang besar bagi keduanya. Persepsi positif ini akan mendorong terciptanya keamanan yang secara luas akan mendukung penanaman modal di KabupatenTojo Una-Una.

Peran pemerintah dalam peningkatan layanan perizinan bagi investasi juga masih perlu ditinggkatkan melalui optimalisasi koordinasi antar instansi yang berkaitan dalam peningkatan layanan perizinan satu pintu. Insentif fiskal bagi investasi perlu direncanakan dan dikoordinasikan dengan pemerintah pusat untuk menjadi daya tarik bagi investor. Kondisi keamanan saat ini di Kabupaten Tojo Una-Una masih sangat kondusif, namun posisi daerah yang berbatasan dengan Kabupaten Poso wilayah konflik komunal dapat mempengaruhi rasa aman investor masuk di Kabupaten Tojo Una-Una, sehingga dibutuhkan penanganan yang khusus dalam membangun rasa aman bagi para investor

Berdasarkan kondisi iklim penanaman modal yang telah diuraikan maka, beberapa kebijakan yang harus di ambil pemerintah dalam upaya menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif dan kompetitif di jabarkan sebagai berikut

1. Penguatan Kelembagaan Penanaman Modal Daerah.

Peningkatan kapasitas kelembagaan melalui penguatan sumberdaya manusia, sistem dan organisasi yang berkaitan dengan pengelolaan penanaman modal daerah, merupakan kebijakan yang harus ditempuh untuk dapat meningkatkan kualitas perencanaan dan pengelolaan penanaman modal daerah.

Peningkatan kompetensi sumber daya manusia untuk mengembangkan penanaman modal daerah melalui peningkatan sumber daya aparat pemerintah, sumber daya pelaku bisnis (UMKM), sumber daya anggota DPR, dan sumber daya masyarakat lokal.

Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah melalui pendidikan formal yang dapat memformulasikan kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada pengembangan penanaman modal daerah, mengoptimalkan pelayanan prima pada proses pengurusan perizinan usaha. Selain hal tersebut beberapa hal yang perlu dilakukan pemerintah dalam kebijakan hal penguatan kelembagaan penanaman modal daerah :

a. Pembangunan sistem pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) di bidang penanaman modal yang lebih efektif di Kabupaten Tojo Una-Una

Salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah adalah kemampuan pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan kepada publik dengan baik. Dalam arti bahwa publik memperoleh pelayanan secara mudah, murah, cepat, dan ramah yang pada akhirnya mencapai ukuran kepuasan publik yang dikehendaki.

Salah satu pelayanan publik yang langsung berkaitan dengan kebutuhan masyarakat dan mempunyai pengaruh langsung adalah pelayanan di bidang perizinan. Baik buruknya pelayanan perizinan akan mempunyai pengaruh terhadap iklim investasi yang pada gilirannya mempunyai pengaruh di bidang pertumbuhan Ekonomi.

Kabupaten Tojo Una-Una yang telah membentuk satuan kerja pelayanan terpadu (satu pintu), namun sampai saat ini dirasakan belum optimal dalam pelaksanaannya karena masih ada kendala, antara lain disebabkan masih adanya perbedaan persepsi antara unit kerja pelayanan, kurang mantapnya pendelagasian kewenangan serta keterbatasan anggaran prasarana dan sarana.

Pemerintah daerah perlu melakukan upaya membangun sistem pelayanan yang dapat memberikan nilai yang tinggi bagi masyarakatnya. Hal ini perlu dilakukan mengingat sistem perizinan pelayanan terpadu satu pintu diharapkan akan meningkatkan pelayanan sehingga masyarakat lebih mudah dalam memperoleh pelayanan yang dibutuhkan. Masyarakat juga memperoleh kepastian hukum dalam berusaha, adanya kemudahan memperoleh ijin akan menciptakan iklim kondusif bagi penanam modal di Kabupaten Tojo Una-Una. Beberapa langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah melalui PTSP di Kabupaten Tojo Una-Una adalah sebagai berikut:

- a. **Mempercepat waktu pelayanan** dengan mengurangi tahapan-tahapan dalam pelayanan yang kurang penting (misalnya: waktu yang dihabiskan oleh pemohon izin untuk mendatangi berbagai instansi). Koordinasi yang lebih baik antar instansi yang terkait dengan perizinan juga akan sangat berpengaruh terhadap percepatan layanan perizinan
- b. **Menekan biaya pelayanan**, selain pengurangan tahapan, pengurangan biaya juga dapat dilakukan dengan membuat prosedur pelayanan serta biaya resmi menjadi lebih transparan.

- c. **Menyederhanakan persyaratan,** dengan mengembangkan sistem pelayanan paralel akan ditemukan persyaratan-persyaratan yang tumpang tindih, sehingga dapat dilakukan penyederhanaan persyaratan. Hal ini juga berdampak langsung terhadap pengurangan biaya dan waktu.

b. Penyiapan sumberdaya daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan PTSP di Kabupaten Tojo Una-Una

Penyelenggaraan pelayanan publik tidak akan lepas peran aparatur yang menjalankan fungsi pelayanan tersebut. Walaupun PTSP bukan merupakan hal baru dalam sistem birokrasi di Kabupaten Tojo Una-Una, namun dalam pelaksanaannya masih banyak didapati beberapa kelemahan pelayanan. Peran aparatur dalam pelayanan ini sangatlah vital, melalui mereka akan tercipta kehandalan, daya tanggap, empati yang dirasakan oleh masyarakat.

Belum berubahnya mindset para sumberdaya apartur dalam memberikan layanan merupakan kendala bagi upaya meningkatkan layanan. Mindset aparatur yang masih merasa bukan melayani namun dilayani akan memberikan hal yang buruk bagi perkembangan suatu daerah.

Sebagai aparatur yang langsung bersentuhan dengan layanan kepada masyarakat, tentunya perlu dibekali dengan pelatihan dan penguatan pemahaman tentang layanan terpadu satu pintu. Meningkatkan kompetensi sumberdaya aparatur dalam memberikan layanan prima akan berdampak pada kepuasan masyarakat serta terbangunnya iklim penanaman modal yang kondusif.

c. Penyiapan sarana dan prasarana penunjang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Pelayanan prima dapat dilaksanakan manakala tersedianya sarana pendukung layanan. Saat ini sarana dan prasaran penunjang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Tojo Una-Una masih belum memadai dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Selain sistem dan sumber daya aparatur, sarana pendukung PTSP juga harus lebih ditingkatkan. Salah satunya adalah sistem informasi yang belum tersedia secara terintegrasi dengan instansi teknis terkait. Sarana ini diperlukan guna memberikan akses bagi instansi teknis terkait untuk memonitoring data penanaman modal yang berkaitan dengan Tupoksinya.

d. Peningkatan Transparansi dalam penyelenggaraan PTSP di bidang penanaman modal

Tuntutan transparansi pelayanan publik saat ini sangat tinggi, merasa di beda-bedakan dan diskriminatif layanan masih sering dirasakan oleh masyarakat dalam memperoleh pelayanan. Pelayanan yang adil dapat dirasakan apabila terjadinya transparansi dalam pemberian layanan kepada masyarakat.

Transparansi layanan dapat diwujudkan melalui penyediaan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada tiap jenis-jenis layanan perizinan. Penempatan SOP di tiap jenis layanan perizinan dan non perizinan dapat memberikan arahan dan dasar evaluasi berjalannya mekanisme pelayanan yang ada di PTSP Kabupaten Tojo Una-Una. Selain SIP, pemerintah juga perlu menetapkan Standar pelayanan minimum dalam upaya meningkatkan pelayanan dengan mengacu pada standar waktu dan efektivitas pelayanan yang disediakan oleh PTSP.

Kebutuhan para penanam modal pada dasarnya adalah adanya transparansi dalam menerima layanan perizinan serta tidak merasa di beda-bedakan. Kepastian pelayanan berkaitan dengan waktu dan biaya merupakan hal utama yang harus diketahui pada setiap layanan perizinan yang dilakukan oleh PTSP.

e. Peningkatan koordinasi antar lembaga/instansi yang menjadi Tim kerja teknis PTSP

Perlunya peningkatan koordinasi antar lembaga teknis yang terkait dengan pelayanan terpadu satu pintu adalah untuk menyamakan langkah dan persepsi serta kerjasama yang baik antar instansi teknis terkait. Saat ini kendala yang muncul adalah belum terkordinasinya instansi teknis yang berkepentingan terhadap izin dan non perizinan dengan pengelola atau tim kerja di PTSP.

Kurangnya koordinasi ini berkaitan dengan belum teraplikasinya mekanisme perizinan yang ada di instansi teknis dengan mekanisme yang ada di PTSP. Selain itu sosialisasi dan sharing data antar instansi terkait dan PTSP kurang maksimal, sehingga hal ini menyulitkan pihak instansi teknis dalam mengevaluasi serta memonitoring kinerja instansi teknis tersebut.

f
g

Kondisi ini tentunya dibutuhkan adanya peningkatan koordinasi antar instansi yang berkaitan dengan pihak PTSP untuk menyatukan langkah dan visi yang sama, agar dapat memberikan layanan prima kepada masyarakat.

2. Pengaturan Bidang Usaha dengan Persyaratan

Arah kebijakan dalam pengaturan bidang usaha dengan persyaratan dimaksudkan untuk memberi batasan dan pedoman bagi bidang usaha tertentu dalam menjalankan aktivitasnya di Kabupaten Tojo Una-Una. Adapun beberapa kebijakan yang perlu dilakukan bagi bidang usaha yang ada Kabupaten Tojo Una-Una dapat dilakukan sebagai berikut:

a. Pengaturan bidang usaha pertambangan dalam kaitannya dengan kelestarian lingkungan hidup dan kontribusi bagi daerah

Tambang yang merupakan salah satu komoditas potensial di Kabupaten Tojo Una-Una, perlu mendapat perhatian dari pemerintah daerah dalam kaitannya dengan pengolahan dan pemanfaatannya. Pemerintah daerah harus mengatur pengelolaan tambang yang berwawasan lingkungan untuk menjaga kelestarian alamnya. Tuntutan *Global warming* dan *Greengoverment* saat menjadi keharusan bagi pengelolaan pemerintah yang melakukan eksploitasi sumberdaya alam tak terbarukan. Hal ini tentunya harus diantisipasi dengan menyiapkan perangkat peraturan daerah yang mendukung pelestarian lingkungan. Selain itu pengelolaan hasil tambang harus memperhatikan azas manfaat bagi masyarakatnya, pengaturan kontribusi dalam bentuk retribusi harus dapat diatur demi kepentingan masyarakat di sekitar tambang khususnya dan masyarakat Kabupaten Tojo Una-Una pada umumnya,

b. Pengaturan bidang usaha eksploitasi hutan yang berwawasan lingkungan dengan tetap mengedepankan keberlangsungan hayati dan kearifan lokal.

Pengelolaan hasil hutan di Kabupaten Tojo Una-Una juga harus menjadi perhatian bagi pemerintah untuk membuat aturan main dalam skala lokal. Pengaturan dalam bentuk perda harus dapat mengakomodir kepentingan pelestarian alam dan juga memperhatikan keseimbangan alam. Pentingnya pengaturan akan batas umur tanaman, serta ukuran dan banyaknya cakupan pengolahan hasil hutan akan sangat berdampak pada pelestarian lingkungan daerah.

c. *Pengaturan pengelolaan kawasan resort di daerah kepulauan untuk tetap menjaga keberlangsungan ekosistem laut*

Pengelolaan kawasan pantai saat ini marak dilakukan oleh para pengusaha baik lokal maupun manca negara dengan membangun resort. Hal tentunya memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi sekitar maupun daerah dengan semakin ramainya wisatawan yang akan berkunjung di resort tersebut.

Namun disisi lain pertumbuhan resort yang tidak terkendali akan berdampak negatif bagi masyarakat sekitar pantai. Kepemilikan resort dengan penguasaan pantai akan memberikan ruang publik yang semakin mengecil. Hal ini tentunya akan memberikan dampak bagi para nelayan serta masyarakat yang akan menikmati pantai.

Pemerintah perlu mengatur jumlah, wilayah dan batasan penguasaan area publik guna tetap menjamin kepentingan masyarakat umum dalam menikmati kekayaan alam daerahnya.

3. Hubungan Industrial

Hubungan industrial yang sehat dalam penanaman modal dimaksudkan untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia di Kabupaten Tojo Una-Una , oleh karena itu diperlukan:

a. *Kebijakan tentang pengupahan yang didasarkan pada kebutuhan fisik minim daerah*

Sistem pengupahan regional yang di tetapkan daerah perlu memperhatikan kebutuhan fisik minimum daerah.Keberpihakan pemerintah pada masyarakat kecil juga tidak harus mengorbankan kepentingan pengusaha dengan menetapkan UMR yang terlalu tinggi. Mekanisme penetapan dibangun melalui jalinan komunikasi antara pemerintah, masyarakat dalam hal ini buruh serta pengusaha, sehingga akan diperoleh keputusan yang merupakan *win-win solution*.

b. *Memaksimalkan peran instansi tenaga kerja dalam hubungan tripartit antara buruh, pengusaha dan pemerintah.*

Hubungan Industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang atau jasa yang meliputi pengusaha, pekerja, dan pemerintah. Kontinuitas hubungan antar pengusaha dan pekerja secara harmonis merupakan impian semua pihak

baik pengusaha, pekerja maupun pemerintah. Pengusaha menginginkan adanya hubungan baik ini sebagai jaminan untuk tetap melanjutkan dengan rencana yang tertata dengan baik, sehingga akan berdampak terhadap produksi yang kontinyu, kepuasan pelanggan dan reputasi perusahaan. Hubungan yang baik ini bagi pekerja memberikan jaminan untuk tetap bekerja secara layak dengan tetap mempertimbangkan kontribusi mereka pada perusahaan. Pemerintah menginginkan hubungan harmonis dalam menjaga iklim bisnis secara umum, gejolak sosial kepercayaan investor.

Konsep yang diinginkan tersebut merupakan sebuah kondisi ideal yang sering tidak tercapai. Sering ditemukan adanya perselisihan hubungan industrial yang disebabkan oleh berbagai faktor. Satu kata kunci setiap perselisihan adanya karena adanya pihak yang kurang terpuaskan baik perusahaan maupun pekerja. Untuk itu, berbagai kemungkinan yang mungkin timbul akibat pola hubungan tersebut harus diantisipasi untuk penyelesaiannya. Dengan demikian jika terjadi masalah hubungan industrial terdapat pola penyelesaian yang jelas dan difahami bersama, baik oleh perusahaan maupun pemerintah melalui mekanisme *tripartit*.

c. Mendorong peran perusahaan dalam upaya meningkatkan kualitas kerja karyawannya melalui pelatihan ketrampilan baik yang dilaksanakan sendiri maupun kerjasama dengan Balai Latihan Kerja (BLK)

Upaya meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui pelatihan bagi tenaga kerja merupakan tanggung jawab bersama baik perusahaan sebagai pengguna maupun pemerintah sebagai pensuplai tenaga kerja. Peran pemerintah melalui mekanisme pengawasannya dapat mendorong pihak pengusaha untuk memberikan pelatihan bagi para tenaga kerjanya. Langkah kedua adalah melalui Balai Latihan Kerja (BLK) yang terdapat di daerah. Perlunya kerjasama antara pemerintah daerah dengan pengusaha untuk mengidentifikasi kebutuhan spesifik ketrampilan dasar yang diharapkan oleh perusahaan, lalu melalui fasilitas BLK pelatihan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Mekanisme ini dapat dilakukan dengan harapan akan meningkatnya ketrampilan tenaga kerja akan berkonsekuensi terhadap peningkatan pendapatan tenaga kerjanya, dan ini nantinya akan berdampak pada meningkatnya ekonomi keluarga serta berkontribusi terhadap perekonomian daerah melalui pajak.

4. Sistem Perpajakan dan Kepabeanan

Arah kebijakan sistem perpajakan dan kepabeanan ke depan adalah pembuatan sistem administrasi perpajakan dan kepabeanan yang sederhana, efektif, dan efisien. Untuk itu diperlukan identifikasi yang tepat mengenai jenis dan tata cara pemungutan pajak dan bea masuk yang akan diberikan sebagai insentif bagi penanaman modal. Pilihan atas insentif perpajakan dan kepabeanan bagi kegiatan penanaman modal perlu memperhatikan aspek strategis sektoral, daerah, jangka waktu, dan juga prioritas pengembangan bidang usaha.

4.2 Arah 2 : Persebaran Penanaman Modal

Arah kebijakan untuk mendorong persebaran penanaman modal adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan sentra ekonomi yang berbasis pada cluster komoditas di Kabupaten Tojo Una-Una yang akan mendorong terimplementasinya One Village One Product (OVOP) yang akan menciptakan efisiensi produksi

Pengembangan sistem kluster produk unggulan di suatu daerah dimaksudkan untuk menciptakan daya saing produk daerah tersebut untuk menjadi produk yang memiliki *competitive advantage*. keunggulan competitive dapat diperoleh manakala daerah memiliki efisiensi yang dihasilkan dengan pencapaian *economy to scale* dari hasil produksinya. **One Village One Product (OVOP)** dimaksudkan untuk menciptakan kluster komoditas unggulan yang ada di suatu daerah. Dengan mengfokuskan pada satu produk suatu daerah maka diharapkan akan tercipta efisiensi dari pengelolaan komoditas tersebut.

Fokus kluster di tiap daerah akan dapat terjadi manakala dukungan pemerintah untuk menciptakan kluster berdasarkan komoditas unggulan di tiap wilayah atau desa dilakukan melalui pengembangan kelompok usaha bersama dalam suatu wilayah dan pembentukan koperasi komoditas unggulan daerah tersebut serta pembinaan kelompok unggulan tersebut.

2. Mendorong penciptaan kawasan industri strategis nasional dalam wujud kebijakan nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) oleh pemerintah pusat

Salah satu strategi nasional dalam rangka pemerataan pembangunan industri di Indonesia adalah melalui kerangka penetapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pada kawasan industri yang ada. Kawasan Ekonomi Khusus merupakan kebijakan pemerintah pusat pada suatu kawasan industri yang memberikan

kemudahan, keringanan, serta bantuan sarana penunjang pengembangan kawasan industri di suatu daerah.

Sebagai daerah yang memiliki potensi industri baik manufaktur yang berorientasi pada sumber bahan baku atau *rawmaterialoriented* dan industri wisata, sangat memungkinkan Kabupaten Tojo Una-Una membangun kawasan industri tersebut di daerah. Upaya meraih kebijakan KEK bagi Kabupaten Tojo Una-Una akan sangat berdampak pada daya tarik daerah sebagai tujuan penanaman modal, para investor akan sangat tertarik pada suatu wilayah yang ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus. Daya tarik ini berkaitan dengan beberapa kemudahan fasilitas pajak dan retribusi yang diberikan oleh pemerintah pusat.

4.3 Arah 3 : Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, dan Energi

1. Pengembangan pangan

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang pangan adalah sebagai berikut:

a. Pengembangan tanaman pangan berskala besar di wilayah Kabupaten Tojo Una-Una melalui pola kebijakan terintegratif

Konsep pengembangan tanaman pangan dapat difokuskan pada tanaman pangan yang saat ini telah banyak di usahakan oleh masyarakat di Kabupaten Tojo Una Una. Komoditas jagung merupakan salah satu bahan pangan yang saat ini menjadi komoditas unggulan di Kabupaten Tojo Una Una. Pengembangan pangan secara terintegratif dapat dimulau dengan penyiapan bibit unggul, penguatan sarana produksi (saprodi), penguatan teknologi budidaya dan pasca panen, penguatan sektor hulu yaitu pasar komoditas. Banyaknya komoditas pangan di Kabupaten Tojo Una- Una saat ini masih diperjualbelikan dalam bentuk belum terolah, artinya bahwa masih terdapat potensi pengolahanj bahan pangan menjadi industri turunan lainnya yang lebih memberikan nilai tambah. Pengelolaan sektor tanaman pangan dapat dilakukan secara terintegrasi misalnya dengan sektor peternakan. Sisa-sisa hasil pertanian tanaman pangan dapat diolah menjadi basis pengembangan pakan ternak, sehingga pengembangan sektor tanaman pangan secara integrasi dapat dilakukan bersamaam dengan penguatan sektor peternakan dan industri yang terkait.

b. Memberi kemudahan aksesibilitas usaha agribisnis pada lembaga keuangan.

Berdasarkan data statistik bahwa sektor pertanian memiliki porsi yang kecil dalam struktur pembiayaan di Kabupaten Tojo Una Una, padahal dalam struktur PDRB sektor pertanian menyumbang sekitar 40 persennya. Kondisi ini adalah sebuah ironi, ditengah upaya pemerintah mempertahankan dan meningkatkan ketahanan pangan dan kemandirian sektor pangan secara nasional. Usaha agribisnis yang banyak melibatkan usaha masyarakat skala kecil masih memiliki akses yang rendah terhadap lembaga pembiayaan baik bank maupun non bank. Sifat usaha agribisnis yang umumnya tidak bankable menjadikan lembaga pembiayaan terutama perbankan sangat berhati-hati dalam memberikan pembiayaan pada sektor ini. Penting bagi pemerintah daerah dalam membangun kemitraan dengan lembaga pembiayaan lainnya yang mampu memberikan bantuan pendanaan dalam pengembangan agribisnis di Kabupaten Tojo Una Una. Gagasan untuk membangun bank pertanian penting untuk dikomunikasikan dengan berbagai stakeholder sehingga penguatan sektor agribisnis di Kabupaten Tojo Una Una di dukung oleh sistem pembiayaan yang kuat.

c. Mendorong pengembangan industri pengolahan komoditas jagung terpadu.

Komoditas jagung sebagai komoditas unggulan di Kabupaten Tojo Una Una saat ini lebih banyak diperdagangkan ke Gorontalo dalam bentuk jagung pipil, yang hanya memberikan nilai tambah yang kecil baik bagi petani maupun bagi sektor perdagangan di Kabupaten Tojo Una Una. Peningkatan nilai tambah komoditas jagung dapat dilakukan melalui investasi pengolahan jagung sehingga akan memberikan nilai tambah yang besar bagi industri jagung secara umum baik sektor hulu nya maupun hilirnya. Perlu adanya industri ini mengingat saat ini ketersediaan komoditas jagung yang secara luas diusahakan oleh masyarakat di Kabupaten Tojo Una Una belum mampu memberikan derajat kesejahteraan secara baik. Beberapa daerah sentra penghasil jagung justru memiliki angka kemiskinan yang tinggi. Ini memberikan makna bahwa komoditas jagung yang dihasilkan dan diperdagangkan tanpa adanya industri pengolahan saat ini belum memberikan manfaat ekonomi yang besar.

d. Penguatan peran minapolitan sebagai salah satu pendukung pangan di Sulawesi Tengah.

Kekuatan potensi sumberdaya kelautan di Kabupaten Tojo Una Una tidak diragukan lagi perannya di Provinsi Sulawesi Tengah saat ini. Keberadaan industri perikanan tangkap yang ada saat ini telah memasok sebagian besar konsumsi ikan di Kota Palu, terutama pada kebutuhan ikan segar yang bernilai ekonomi tinggi yang disajikan di beberapa rumah makan di Kota Palu. Meskipun telah memberikan sumbangan yang nyata bagi ketersediaan ikan di Kota Palu sebagai penunjang nadi kehidupan sektor perhotelan dan rumah makan lainnya, namun pengelolaan sektor perikanan saat ini belum maksimal. Masih banyak potensi minapolitan yang belum tergarap di Kabupaten Tojo Una Una, dan potensi itu masih dapat dioptimalkan dalam memberikan nilai tambah ekonomi masyarakat setempat maupun bagi penyokong ketahanan pangan di Provinsi Sulawesi Tengah. Budidaya rumput laut, kerang mutiara, pengolahan rumput laut, pengolahan hasil perikanan merupakan potensi yang dapat dikembangkan baik melalui investasi kecil UMKM maupun investasi skala menengah yang besar. Perlu dikembangkan kerjasama investor besar dalam pengelolaan sumberdaya alam berbasis kelautan terutama pengembangan potensi mutiara dan pengolahan rumput laut terutama pada fase *carrageenan*.

2. Pengembangan Infrastruktur

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal di bidang infrastruktur adalah sebagai berikut:

a. Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur transportasi darat menuju kantong-kantong produksi

Salah satu kendala dalam penciptaan efisiensi produksi di Kabupaten Tojo Una-Una adalah kurang memadainya infrastruktur jalan di beberapa kantong produksi. Kondisi ini yang sering menyebabkan tingginya biaya produksi dan distribusi hasil pertanian dan perkebunan daerah.

Pemerintah daerah perlu menyediakan dan meningkatkan kualitas jalan yang saat ini sebagian besar atau 43 persen jalan di Kabupaten Tojo Una-Una masuk kategori rusak. Perhatian pemerintah melalui program pembukaan jalan sebaiknya difokuskan pada beberapa wilayah yang merupakan kantong-kantong produksi pertanian dan perkebunan. Peningkatan kualitas jalan akan berdampak pada meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat dan akhirnya akan berdampak pada peningkatan ekonomi daerah.

b. Peningkatan jumlah transportasi laut massal dalam mengangkut penumpang dan barang antar kepulauan di Kabupaten Tojo Una-Una

Sebagai daerah kepulauan, keberadaan transportasi laut sangat dibutuhkan untuk menjangkau wilayah kepulauan di beberapa kecamatan. Saat ini kebutuhan transportasi laut di Kabupaten Tojo Una-Una telah disediakan beberapa sarana transportasi seperti boat, feri dan kapal kayu.

Seiring dengan peningkatan jumlah wisatawan dan berkembangnya daerah-daerah kepulauan dengan keberadaan resort dan wisata, tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan sarana transportasi laut saat ini dirasakan kurang. Pemerintah dalam hal ini harus berperan dalam dorong swasta untuk menyiapkan dan berinvestasi di bidang ini. Dorongan ini dapat dilakukan melalui stimulus insentif yang diberikan kepada swasta untuk membuka rute dan jalur baru bagi transportasi laut di Kabupaten Tojo Una-Una.

c. Percepatan pembangunan infrastruktur bandar udara di Kabupaten Tojo Una-Una

Program pengembangan perhubungan daerah timur salah satunya adalah pembangunan Bandar Udara di Kabupaten Tojo Una-Una. Program ini menjadi program primadona pemerintah daerah, karena akan sangat banyak dampak yang dihasilkan dari keberadaan bandar udara. Terbukanya aksesibilitas Kabupaten Tojo Una-Una dengan beberapa daerah luar pulau akan sangat memberi pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Terbukanya bandar udara ini akan meningkatkan kunjungan wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Pertumbuhan ekonomi yang dipicu dari semakin banyaknya kegiatan ekonomi di daerah berkaitan dengan semakin tingginya kebutuhan baik masyarakatnya maupun wisatawan yang datang ke Kabupaten Tojo Una-Una.

Kondisi ini tentunya perlu didukung dengan senantiasa melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan penerbangan di bandar udara Tanjung Api.

3. Pengembangan Energi

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang energi adalah sebagai berikut:

a. Mendorong pengembangan potensi sumber energi PLTMH sebagai alternatif energi listrik dari minyak di wilayah Kabupaten Tojo Una-Una

Potensi sumberdaya alam terutama dari debit air yang cukup banyak tersebar di Kabupaten Tojo Una Una perlu dipetakan dan dikelola secara baik untuk menyiapkan sumber energi alternatif yang murah dan memiliki kontinuitas yang baik. Berbagai aliran sungai di Kabupaten Tojo Una Una memiliki potensi yang besar untuk membangkitkan turbin PLTMH, sehingga akan mengurangi secara drastis penggunaan energi listrik yang menggunakan tenaga diesel dan sumber bahan bakar fosil. Penggunaan energi PLTMH akan mendorong pemanfaatan energi hijau (*green energy*) yang ramah lingkungan.

b. Mendorong pengembangan potensi sumber energi gas sebagai alternatif energi listrik dari minyak di wilayah Kabupaten Tojo Una-Una.

Selain potensi listrik dari PLTA maupun PLTMH, potensi sumber listrik dari gas juga cukup tersedia di Kabupaten Tojo Una Una. Terdapatnya gas di kawasan Tanjung apimemberikan gambaran bahwa sumber energi ini cukup tersedia di Kabupaten Tojo Una Una yang memerlukan pola pemanfaatan yang tepat. Penggunaan energi gas sebagai bagian dari pengembangan energi listrik akan memberikan penguatan bagi pengurangan energi listrik yang berbahan bakar fuel yang memberikan dampak bagi kerusakan lingkungan. Bahan bakar fuel yang sifatnya tidak terbarukan dan makin mahal merupakan salah satu alasan strategis perlunya pengembangan sumber energi lain yang lebih ramah lingkungan, murah dan tersedia dalam jangka panjang.

4.4 Arah 4: Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*)

Proses penanaman modal harus memiliki implikasi jangka panjang dan terutama tetap mempertahankan kondisi ekosistem lingkungan. Lingkungan merupakan sebuah ekosistem tertentu yang memiliki daya dukung terhadap upaya pengembangan wilayah tertentu. Ekosistem secara alamiah memiliki daya dukung yang baik selama belum ada perubahan lingkungan secara drastis. Untuk itu proses investasi harus mampu mengubah kondisi lingkungan ekosistem yang pada satu sisi memberikan nilai tambah yang optimal bagi masyarakat, namun tetap menjaga kelestariannya.

Konsep pengembangan investasi yang berwawasan lingkungan berarti akan terdapat *mutual benefit* dari pengembangan usaha yang pada satu sisi bagi

terpeliharanya lingkungan fisik dan pada satu sisi yang lain akan memberikan manfaat bagi manusia.

Mutual benefit tersebut pada hahikatnya akan terbangun jika konsep pengembangan investasi didasarkan pada rambu-rambu investasi yang berwawasan lingkungan. Upaya membangun Kabupaten Tojo Una Una melalui investasi yang berwawasan lingkungan dapat dilakukan melalui arah kebijakan sebagai berikut :

a. Peningkatan sinergi dalam meningkatkan pembangunan yang berkesimbangan dengan pemeliharaan hutan dan ekosistem bawah laut.

Pengembangan investasi harus mampu mempertahankan ekosistem sebagai daya dukung investasi dalam jangka panjang. Kabupaten Tojo Una Una yang memiliki kekayaan alam terutama pada sektor kelautan seperti ekosistem bawah laut yang beraneka raga, coral reef yang masih alami, memerlukan perhatian yang baik dalam kebijakan investasinya. Perlu dibangun sebuah sinergi investasi yang mampu mempertahankan kekayaan hayati sehingga keberadaan investasi mampu menjaga kekayaan ini dalam jangka panjang. Potensi sektor kehutanan juga terbentang cukup luas. Keberadaan meubel sebagai produk inti daerah memerlukan daya dukung hutan sebagai sumber bahan baku. Namun demikian pemanfaatan hutan secara arif akan mempertahankan hutan sebagai ekosistem yang tidak saja menyiapkan bagi industri meubel, namun akan memberikan keseimbangan pada kelestarian lingkungan, penyediaan udara yang bersih dan terjaganya kualitas lingkungan. Terjaganya hutan dalam jangka panjang juga akan mengidupi sektor industri meubel yang digagas menjadi sektor pioniir daerah (produk inti daerah). Keberadaan Taman Nasional Kawasan Togen (TNKT) sebagai upaya pemerintah pusat mempertahankan ekosistem hutan perlu ditindaklanjuti secara bijak, sehingga pengembangan kawasan wisata dan investasi sektoral akan tetap mempertimbangkan keseimbangan ekosistem hutan sebagai bagian dari kekayaan hayati pendukung wisata dan investasi.

b. Pengembangan sektor energi baru terutama dari sumber yang ramah lingkungan yaitu air, gas yang terdapat di Kabupaten Tojo Una Una.

Energi merupakan kebutuhan vital saat ini dan akan terus tumbuh permintaannya dimasa mendatang. Ketergantungan pada sektor energi yang terus tumbuh memerlukan penyikapan secara bijak dalam penyiapannya. Investasi pada sektor ini akan memberikan efek yang besar bagi tumbuhnya

sektor lainnya. Ketersediaan energi dalam jumlah yang cukup, akan menstimuli tumbuhnya sektor industri pengolahan yang umumnya memerlukan kontinuitas pasokan energi yang murah dan jangka panjang. Potensi sumber energi di Kabupaten Tojo Una Una terutama dari gas dan sumber air, merupakan kekayaan yang perlu di atur dengan baik sehingga pengelolaannya dapat secara optimal memberikan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan dan keseimbangan lingkungan. Perlu adanya pemetaan yang cermat sebagai langkah untuk menata investasi dibidang energi ini, sehingga pemanfaatannya di masa mendatang akan memberikan kontribusi paling besar bagi pertumbuhan daerah.

c. Fasilitasi penanaman modal yang bersinergi dengan pelestarian terumbu karang dan ekosistem bawah laut di kepulauan togean dan pulau lainnya.

Kepulauan togean secara spesifik memiliki daya tarik ekosistem yang kuat sebagai tujuan investasi. Perlu penguatan dari pemerintah daerah dalam meningkatkan investasi yang peduli pada pemeliharaan terumbu karang sebagai kekayaan hayati spesifik di kawasan Togeana. Investasi yang berbasis pariwisata kelautan dan ekosistem bawah laut perlu memperoleh prioritas oleh pemerintah daerah sehingga proses investasi yang dilakukan sekaligus sebagai upaya pemerintah daerah dalam melestarikan coralreef dan biota lainnya di kawasan wisata bawah air Kabupaten Tojo Una Una.

Perlu penguatan pula investasi yang secara sosial mampu merangkul masyarakat yang berpotensi merusak lingkungan misalnya pengebom ikan, perusak ekosistem mangrove, untuk bersinergi beraktivitas yang menciptakan mutual benefit dengan investor dalam meningkatkan derajat ekonomi mereka sambil mempertahankan dan memperbaiki lingkungan terutama ekosistemn bawah laut.

d. Pengembangan orientasi penanaman pada sektor industri jasa pariwisata yang tidak berdampak pada kerusakan lingkungan.

Indutri jasa pariwisata menekankan adanya interaksi sosial dan tidak banyak menggunakan input bahan baku alam. Oleh karena investasi ini adalah merupakan *green economy* yang perlu dikembangkan di Kabupaten Tojo Una Una ditengah potensi alam yang kuat sebagai keunggulan spesifik daerah. t
CN

Pengembangan pariwisata alam akan memberikan manfaat bagi kelestraian alam sebagai daya tarik wisata. Kondisi alamiah alam di Kabupaten Tojo Una Una memiliki daya tarik yang tinggi yang memerlukan pelestarian dalam pengelolannya. Peningkatan investasi pariwisata yang berbasis pada keindahan alam akan memiliki dampak yang baik bagi terjaganya alam sekitar ditengah upaya peningkatan usaha pariwisata. Dengan demikian peningkatan investsai pada sektor ini akan seiring dengan pelestarian lingkungan, dan tanpa merubah fungsi lingkungan. Demikian demikian pengembangan pariwisata alam akan menghindari adanya alih fungsi lahan sebagaimana yang terjadi pada pengembangan investasi sektor industri lainnya.

e. Pengembangan kawasan minapolitan sebagai basis ekonomi masyarakat.

Pengembangan investasi minapolitan akan memberikan dampak yang kecil pada perusakan lingkungan. Minapolitan di Kabupaten Tojo Una Una di dasarkan pada besarnya potensi perikanan maupun rumput laut yang ada di daerah kepulauan. Pengembangan budidaya kelautan melalui insentifikaasi dan ekstensifikasi budidaya ikan, peningkatan kapasitas penangkapan ikan, serta budidaya rumput laut akan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat dengan sedikit berdampaak pada alih fungsi lahan dan kerusakan lingkungan. Optimalisasi industri pelelangan ikan (TPI) serta industri hilirnya seperti pengolahan abon ikan, ikan asin daan sebagainya akan memberikan nilai tambah yang besar bagi masyarakat.

f. Pengembanagn kawasan wisata alam dengan menekankan pada penguatan mutualisme dengan masyarakat lokal potensi perusak lingkungan.

Telah disadari bahwa keberadaan masyarakat dengan tingkat pendapatan dan pendidikan yang rendah akan berpotensi mencari jalan pintas untuk mampu bertahan hidup, meskipun apa yang dilakukan terkadang memberikan dampak terhadap kerusakan lingkungan sekitar. Fakta adanya pengeboman ikan di berbagai tempat di Kabupaten Tojo Una Una menjustifikasi kondisi tersebut. Para pelaku umumnya adalah masyarakat lokal yang memiliki pendapatan yang terbatas, memiliki sarana penagkapan ikan yang terbatas serta pendidikan yang sangat minim. Kondisi ini harus memperoleh perhatian yang besar ditengah upaya pemerintah menggencarkan program percepatan pembangunan dengan keseimbangan ekosistem yang lestasi.

Ketidakmampuan masyarakat yang berpotensi merusak lingkungan pada satu sisi merupakan sebuah dilema yang sulit untuk dihilangkan, meskipun dengan pendekatan aspek hukum sekalipun. Untuk itu pendekatan yang dapat dilakukan harus bersifat komprehensif, sehingga keberadaannya mereka yang dianggap sebagai “predator” lingkungan harus diubah menjadi “guard” lingkungan sekitarnya.

Upaya penciptaan masyarakat yang peduli lingkungan perlu dibangun melalui kebijakan yang memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar, sehingga keberadaan lingkungan bagi masyarakat lokal merupakan penyangga hidup mereka. Jika mereka merasa mendapatkan manfaat dari lingkungan yang lebih besar dengan cara memeliharanya, maka peluang kerusakan lingkungan akan semakin kecil.

Konsep pengembangan investasi yang mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat yang berpeluang merusak lingkungan akan memberikan manfaat yang sangat besar. **Pertama**, fungsi pengawasan lingkungan akan dilakukan sendiri oleh masyarakat, sehingga peran pengawasan lingkungan akan semakin kecil dan sumber daya pemerintah dapat di manfaatkan pada kegiatan yang lain. **Kedua**, masyarakat akan memperoleh manfaat ekonomi dari kegiatan investasi yang melestarikan lingkungan. Dengan pola ini, maka pendapatan masyarakat akan meningkat dan mengurangi tingkat pengangguran di masyarakat.

4.5 Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah Dan Koperasi (UMKM)

UMKM adalah salah satu unit usaha yang hingga saat ini memiliki serapan tenaga kerja yang tinggi dan secara empiris memiliki kemampuan bertahan (adaptasi) terhadap konjungtur ekonomi dunia. Keberadaan UMKM tidak dapat dipisahkan dari aktivitas ekonomi nasional, karena keberadaannya tidak memerlukan bimbingan maupun pendanaan yang besar dari pemerintah. Keberadaan UMKM mampu meningkatkan kemampuan daerah dalam menyiapkan lapangan kerja yang luas, pemanfaatan sumber daya melimpah yang ada di daerah. Namun demikian secara umum kualitas pengelolaan UMKM masih sederhana, sehingga daya saing UMKM masih relatif rendah. Berdasarkan data nasional, jumlah UMKM yang mampu menembus pasar ekspor besarnya tidak lebih dari 1 %. Ini memberikan makna bahwa daya saing UMKM masih lemah

meskipun keberdaannya massive dari segi jumlah, jenis maupun serapan tenaga kerjanya.

Pengembangan UMKM dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan. Pemerintah daerah dalam upaya membangun UMKM dapat dilakukan melalui proses pembinaan manajerial UMKM, peningkatan kemampuan modal, peningkatan kualitas produksi, serta peningkatan penetrasi pasar bagi produk UMKM.

Strategi lainnya adalah dengan peningkatan fasilitasi UMKM dengan usaha besar. Tujuannya adalah meningkatkan *link* perusahaan besar dengan UMKM. Dengan kemitraan ini, maka akan terjadi peningkatan kemampuan teknologi dari perusahaan besar ke perusahaan kecil, penguatan hubungan pemasok antara UMKM dengan perusahaan besar serta dalam jangka panjang akan membangun proses produksi perusahaan kecil sebagai vendor bagi penyediaan bagian produk perusahaan (*part*). Secara spesifik, upaya pengembangan UMKM oleh daerah dapat dilakukan dengan berbagai kebijakan yaitu :

a. Peningkatan skala usaha UMKM ke arah usaha yang lebih besar (strategi naik kelas)

Strategi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan pasar UMKM melalui penambahan produk, perluasan pasaran sasaran, perluasan kemitraan dengan usaha besar. Perluasan ini dapat dilakukan melalui fasilitasi pemerintah dengan menghubungkan UMKM dengan usaha besar sebagai wadah untuk membangun strategi aliansi. Konsep ini akan mampu meningkatkan kemitraan UMKM dengan usaha besar, peningkatan hubungan pemasok antara UMKM dan perusahaan besar, peningkatan alih teknologi dan informasi, serta peningkatan kualitas dan standar produk. Implementasi strategi ini akan meningkatkan kualitas UMKM dalam pengelolaan kapasitas usaha yang lebih besar sehingga pengembangan UMKM diarahkan untuk menciptakan skala usaha yang lebih besar dan lebih berdaya saing.

b. Peningkatan kemitraan UMKM dengan usaha besar untuk peningkatan kualitas pengelolaan UMKM.

Konsep peningkatan kualitas pengelolaan UMKM dapat dilakukan dengan peningkatan kemitraan UMKM dengan usaha besar. Konsep bapak angkat bagi UMKM akan sangat membantu dalam berbagai aspek pengelolaan UMKM. Kemampuan UMKM dalam aspek pendanaan dapat diatasi melalui berbagai program CSR perusahaan besar, kemampuan produksi yang masih lemah akan terbantu melalui pemanfaatan pembinaan dan standar produksi perusahaan

besar, pasar yang kecil dapat terbangun melalui hubungan pemasok dengan perusahaan besar.

Konsep pengembangan kemitraan ini dalam jangka panjang akan mampu mengarahkan UMKM sebagai unit kecil yang berperan penting dalam perusahaan besar. Jika konsep ini dapat berlangsung dalam jangka panjang maka akan mendukung terciptanya *Just In Time* bagi hubungan industri besar dengan UMKM yang menjadi mitranya. Dengan demikian, implementasi kolaborasi UMKM dengan perusahaan besar akan menciptakan efisiensi produksi baik bagi UMKM yang berperan sebagai vendor maupun perusahaan besarnya sebagai induknya.

c. Menumbuhkembangkan UMKM melalui penguatan kapasitas Manajerial UMKM.

Kapasitas manajerial UMKM umumnya masih rendah sehingga daya sing relatif rendah, terutama untuk memasuki pasar sasaran yang lebih kompetitif. Lemahnya manajerial ini merupakan salah satu alasan mengapa diperlukan penguatan manajerial pengelolaan untuk membangun UMKM yang tangguh. Pengelolaan manajerial dapat dilakukan melalui pembentukan KUBE sebagai wadah *coaching klinik* bagi penguatan manajerial UMKM. Selain itu, dapat pula dilakukan pendampingan bagi pelaku UMKM baru, sehingga mampu memberikan penguatan pengelolaan untuk melewati masa masa kritis saat awal mula dimulainya usaha UMKM (*infant of small micro business*)

d. Penguatan pemasaran produk UMKM untuk memperluas cakupan pasar dan positioning UMKM.

Penguatan pasar memerlukan penguasaan strategi pasar yang baik dari pelaku usaha UMKM. Penguatan pasar ini dapat dimulai dengan membentuk pasar bersama UMKM yang digagas oleh Pemerintah Daerah. Dengan pola ini, maka bagi pelaku usaha UMKM akan mampu meningkatkan kapasitas pasarnya melalui wadah pasar bersama. Pola ini juga akan membangkitkan usaha UMKM karena kepastian pasar produk mereka. Penguatan wadah melalui usaha daerah (Perusahaan daerah) merupakan hal yang dapat dilakukan dalam wujud penyangga bagi produk UMKM daerah.

e. Peningkatan kapasitas pendanaan melalui penguatan informasi UMKM dengan lembaga keuangan dan non keuangan

Eksistensi lembaga keuangan saat ini yang begitu banyak merupakan peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha UMKM dalam membangun dan membesarkan usahanya. Namun demikian tidak sedikit usaha UMKM yang

tidak memiliki akses pendanaan yang memadai terhadap lembaga tersebut. Kelemahan manajerial, lemahnya informasi, lemahnya pelaku usaha UMKM memenuhi persyaratan administrasi menjadikan usaha UMKM lemah aksesnya terhadap lembaga pembiayaan. Dengan demikian solusi yang harus dibangun adalah memberikan pendampingan bagi pelaku usaha UMKM dalam memperoleh akses terhadap lembaga pembiayaan yang ada. Dengan pola ini, maka akan menghindarkan pelaku usaha UMKM dari praktek Ijon dan rentenir, yang cenderung memberikan solusi pendanaan yang pada akhirnya akan memberatkan pelaku usaha UMKM.

f. Mendorong kemitraan perusahaan besar dengan UMKM untuk menjadi bagian dari Supply chain sistem produksi.

Penguatan kelembagaan UMKM dengan perusahaan dalam membangun kerjasama merupakan langkah yang dapat dilakukan pemerintah dalam memfasilitasi terbentuknya hubungan pemasok antara perusahaan besar dengan UMKM. Aliansi ini akan meningkatkan proses alih teknologi perusahaan besar kepada pelaku usaha UMKM, penguatan pasar, serta perbaikan pengelolaan. Pemanfaatan dana CRS dalam peningkatan kapasitas pengelolaan usaha UMKM dalam memenuhi persyaratan administrasi serta kualitas produk merupakan peluang yang dapat diambil oleh pemerintah daerah.

4.6 Pemberian Fasilitas, Kemudahan, Dan Atau Insentif Penanaman Modal

Persaingan antar daerah dalam meningkatkan daya saing daerahnya dalam penanaman modal dilakukan dengan berbagai pendekatan. Salah satu hal yang lazim dilakukan oleh pemerintah termasuk juga pemerintah daerah adalah menciptakan stimulus yang diharapkan akan memberikan daya tarik investasi bagi investor. Berbagai bentuk stimulus didefinisikan oleh pemda dalam membangun daya tarik daerah, diantaranya adalah dengan memberikan keringanan retribusi, kemudahan dalam memperoleh lahan, kemudahan dalam perizinan dan sebagainya. Upaya pemberian fasilitas dan kemudahan investasi ini harus mengacu pada program prioritas daerah, sehingga meningkatkannya investasi benar-benar sesuai dengan tujuan dan visi daerah dalam membangun daerahnya. Prioritas pemberian fasilitas di Kabupaten Tojo Una-Una dapat diarahkan pada sektoral unggulan kabupaten, terutama pada sektor pariwisata yang menjadi keunggulan daerah. Pemberian fasilitas dapat diarahkan pada pengembangan

investasi yang berbasis pada sektor kelautan dan perikanan dimana sumberdaya alam di Kabupaten Tojo Una Una cukup melimpah. Ini memberikan makna bahwa upaya pemberian kemudahan investasi diarahkan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi melalui proses penanaman modal pada sektor yang dianggap memberikan *multiplier effect* bagi daerah, baik dari segi pengelolaan sumber daya, penyerapan tenaga kerja serta ketersediaan lapangan kerja dalam jangka panjang. Arah kebijakan investasi daerah dapat mengacu pada beberapa aspek yaitu :

a. Optimalisasi pelayanan perizinan untuk meningkatkan daya tarik investasi di daerah.

Kemudahan perizinan dan upaya debirokratisasi telah menjadi target pemerintah untuk meningkatkan daya tarik investasi, melalui penyederhanaan sistem pelayanan investasi. Penyederhanaan alur perizinan ini telah menjadi tekad kuat dari berbagai pemangku kepentingan melalui pembentukan wadah PTSP. Pemanfaatan wadah ini ditujukan untuk memperpendek jalur birokrasi serta mengindarkan adanya ekonomi biaya tinggi yang disebabkan oleh biaya administrasi yang tidak diperlukan. Upaya peningkatan kualitas pelayanan melalui PTSP harus secara internal dibentuk melalui pembentukan gugus tugas yang mengkoordinasikan seluruh pihak yang terkait dengan pelayanan perizinan satu pintu. Koordinasi ini akan memberikan kepastian pelaksanaan PTSP sesuai dengan tujuannya bahwa pelayanan perizinan investasi hanya dilakukan pada satu proses saja (*one stop services*). Koordinasi ini akan memperkuat penyatuan konsep dan kepentingan antar lembaga dalam memberikan perizinan investasi.

b. Peningkatan insentif pada investasi berwawasan lingkungan, penyerapan tenaga kerja tinggi.

Insentif perlu dikembangkan di Kabupaten Tojo Una Una, mengingat dalam jangka panjang diperlukan investasi yang besar dalam memanfaatkan sumber daya yang melimpah di Kabupaten Tojo Una Una. Namun demikian keberadaannya sebagai daerah yang memiliki potensi wisata alam yang kuat, diperlukan dukungan yang kuat untuk memberikan insentif pada investasi bagi calon investor yang berwawasan lingkungan dan sifat investasinya yang memberikan multiplier pada penciptaan lapangan kerja dan serapan tenaga kerja lokal yang cukup tinggi.

c. Peningkatan pelayanan perizinan mendirikan usaha

Upaya meningkatkan wirausaha baru dapat dilakukan oleh pemerintah daerah melalui kebijakan mempermudah mendirikan usaha baru. Berbagai perizinan yang dapat dilakukan melalui PTSP akan memberikan dorongan yang kuat

setiap pelaku usaha untuk memformalisasi usahanya. Dengan formalisasi usaha yang lebih sederhana dan murah, maka secara administratif akan mendorong lahirnya *good governance* pengelolaan usaha pada skala yang kecil sekalipun. Kondisi perusahaan yang lengkap secara administrasi akan memberikan manfaat jika perusahaan berhubungan dengan perbankan dalam proses kredit, serta aktivitas lainnya yang memerlukan proses legalitas.

d. Peningkatan penyediaan lahan investasi

Harga lahan merupakan salah satu faktor penting yang diperhitungkan untuk investasi, selain harga tenaga kerja. Kecenderungan peningkatan harga tanah di berbagai daerah merupakan sebuah peluang yang dimanfaatkan oleh Kabupaten Tojo Una Una dalam membangun daya tarik investasi dengan konsep biaya investasi tanah yang murah. Kondisi ini dimungkinkan karena masih luasnya ketersediaan lahan di Kabupaten Tojo Una Una yang dapat dimanfaatkan menjadi kawasan industri. Penyediaan tanah pada lahan kawasan akan memberikan keterjaminan legalitasnya, dibandingkan pada tanah tanah milik masyarakat. Pemerintah daerah dapat melakukan kenijakan dengan melarang proses jual beli pada lahan tertentu yang diperuntukkan bagi kawasan industri. Dengan cara ini, maka kenaikan harga tanah dapat dihindari, karena tidak adanya proses legalitas dan transaksi penjualan tanah pada lokasi tersebut. Cara ini diyakini akan membantu investor untuk memperoleh harga tanah dengan harga yang murah, legal dan pada luasan yang dibutuhkan perusahaan.

e. Pembebasan bea pajak bagi investasi yaang bermitra dengan UMKM

Pengurangan bea pajak daerah bagi perusahaan dapat dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan daya tarik investasi di Kabupaten Tojo Una Una. Pengurangan bea pajak ini dapat dikaitkan dengan tujuan spesifik investasi yang masuk. Kondisi yang dapat dikenakan kebijakan ini diantaranya investasi yang berorientasi pemeliharaan lingkungan, investasi yang menyertakan kemitraan dengan UMKM lokal, investasi yang mampu menyerap tenaga kerja yang tinggi.

Pengurangan bea pajak ini dalam jangka pendek dapat mengurangi potensi pajak daerah, namun dalam jangka panjang *multiplier efect* yang diciptakan akan jauh lebih besar. Perusahaan yang mampu menyerap tenaga kerja yang besar akan memberikan lapangan kerja yang luas bagi masyarakat luas, sehingga daya beli mereka juga akan meningkat. Peningkatan daya beli masyarakat ini akan menggulirkan potensi ekonomi lainnya seperti

perdagangan, transportasi, komunikasi dan sebagainya. Perusahaan yang mampu memberikan *mutual benefit* dengan masyarakat lokal yang berpotensi merusak lingkungan akan memberikan jaminan perbaikan lingkungan dalam jangka panjang. Makin kurangnya dana pemerintah dalam pengawasan kerusakan lingkungan serta rehabilitasi lingkungan sehingga terjadi efisiensi pemanfaatan dana pembangunan daerah.

4.7 Arah 7 : Promosi Penanaman Modal

Peningkatan investasi di daerah, terutama daerah yang memiliki potensi investasi memerlukan upaya-upaya pengembangan dalam jangka panjang yang dimaksudkan untuk memperkenalkan potensi sumber daya yang dimiliki kepada calon investor potensial. Mengingat berbagai upaya yang dilakukan oleh berbagai daerah dalam meningkatkan minat investor untuk berinvestasi di daerahnya masing masing, maka pemerintah Kabupaten Tojo Una Una juga tidak boleh tinggal diam hanya dengan mengandalkan potensi ekonomi dan kekayaan alam yang dimiliki. Perlu adanya upaya konkrit untuk melakukan promosi yang kuat dalam membangun image yang kuat bahwa Kabupaten Tojo Una Una merupakan daerah yang cukup kompetitif untuk tempat investasi. Arah kebijakan promosi investasi di Kabupaten Tojo Una Una dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Pengembangan citra sebagai daerah tujuan investasi.

Penguatan citra daerah adalah sebuah upaya *image building* yang dimaksudkan untuk menunjukkan bahwasanya Kabupaten Tojo Una Una adalah kabupaten yang pro investasi. Peningkatan *image* ini dapat dilakukan melalui media yang ada baik iklan, pameran dan *public relation*. Pengembangan image sebagai daerah tujuan investasi akan memberikan informasi positif bagi calon investor maupun dan membangun kenyamanan bagi investor yang telah masuk di Kabupaten Tojo Una Una. Kesadaran untuk membangun citra positif sebagai daerah tujuan investasi harus dibarengi upaya secara sinergis dengan berbagai stakeholder lainnya seperti pelayanan PTSP, kemudahan - kemudahan investasi, penyiapan dan peningkatan infrastruktur dan lain sebagainya. Penguatan citra yang sinergi dengan perbaikan bidang-bidang lainnya akan membangun *reliability* sistem penanaman modal daerah yang pada akhirnya akan menciptakan kepuasan investor, dan memberikan dampak bagi promosi secara luas melalui *positive word of mouth*.

2. Pengembangan strategi promosi yang berfokus pada pilar ekonomi unggulan yaitu perikanan dan kelautan, wisata alam, dan sumber energi bersih.

Seluruh potensi daerah perlu dikembangkan dengan baik untuk memberikan nilai tambah ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan investasi merupakan upaya untuk meningkatkan pemanfaatan sumber daya yang melimpah untuk kesejahteraan masyarakat secara luas. Namun demikian dalam proses membangun investasi yang *massive* dalam waktu yang bersamaan, terasa sulit untuk dilakukan. Untuk itu, diperlukan strategi fokus dalam mempromosikan potensi daerah di Kabupaten Tojo Una Una. Fokus yang dapat dikembangkan adalah pilar ekonomi daerah, terutama pada sektor pariwisata. Peningkatan investasi pariwisata diyakini akan mampu meningkatkan potensi wisata yang ada di Kabupaten Tojo Una Una. Sektor lainnya yang perlu difokuskan adalah investasi pada sektor kelautan dan perikanan. Sebagai daerah yang memiliki basis wilayah laut yang luas Kabupaten Tojo Una Una memiliki banyak potensi di sektor ini. Aspek sosial masyarakat yang kuat dalam bidang kelautan dan perikanan memberikan nilai tambah yang kuat dalam pendukung investasi. Sumberdaya kelautan seperti ikan, rumput laut merupakan potensi ekonomi yang dapat difokuskan untuk promosi investasi. Investasi sektor ini akan memberikan manfaat yang cepat menghasilkan dan berdampak langsung kepada masyarakat di Kabupaten Tojo Una Una karena persebaran sektor hulu yang luas dan jumlah pengusahaannya yang cukup besar. Sektor perkebunan cukup potensial sebagai sektor yang dapat dikembangkan dalam investasi melalui promosi yang terfokus.

3. Peningkatan kerjasama dengan BKPM untuk ikut serta *joint promotion* yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat.

BKPM pusat sebagai *leading* penanaman modal nasional memiliki berbagai program promosi yang dapat dimanfaatkan oleh Kabupaten Tojo Una Una dalam membangun *joint promotion* pada komoditas unggulan daerah. Berbagai program promosi BKPM seperti Promosi produk unggulan daerah, pameran investasi dan sebagainya dapat diikuti oleh pemerintah Kabupaten Tojo Una Una dalam wujud keikutsertaan dalam kegiatan. Pola ini akan memberikan manfaat bagi proses promosi potensi investasi di Kabupaten Tojo Una Una dengan biaya yang relatif murah.

4. Peningkatan penggunaan database komoditas investasi melalui Penggunaan IT di Kabupaten Tojo Una Una sebagai media promosi.

Program promosi dengan menggunakan IT adalah salah satu promosi yang efektif saat ini ditengah peningkatan secara drastis penggunaan IT dalam kehidupan masyarakat modern saat ini. Dipertukan penyiapan SDM dan data yang valid untuk pengembangan promosi investasi melalui sistem IT. Pemanfaatan IT sebagai media informasi dan promosi produk unggulan daerah memiliki jangkauan yang luas, sehingga dalam jangka panjang promosi ini akan membangun relasi informasi dan sebaran informasi secara luas.

BAB V PETA PANDUAN (ROAD MAP) IMPLEMENTASI RUPM KABUPATEN TOJO UNA-UNA

5.1 Kondisi Kekinian Penanaman Modal di Kabupaten Tojo Una-Una

1. Pertumbuhan Penanaman Modal di Kabupaten Tojo Una-Una

Pengembangan investasi daerah dalam jangka pendek dimaksudkan untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya yang melimpah. Dengan pola ini, fokus pengembangan investsai daerah masih bertumpu pada *natural resources oriented*. Pendekatan ini memberikan tekanan pada pemanfaatan sumber daya alam yang melimpah yang ada di Kabupaten Tojo Una-Una, sehingga dengan keberadaan investasi yang bergerak pada pengolahan hasil-hasil bumi akan memberikan nilai tambah ekonomi dan peningkatan perekonomian masyarakat, terlebih lagi secara sosial masyarakat di Kabupaten Tojo Una-Una telah secara turun temurun memiliki pengalaman dalam mengusahakan berbagai sektor ekonomi, terutama pada sektor primer seperti pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, dan kehutanan.

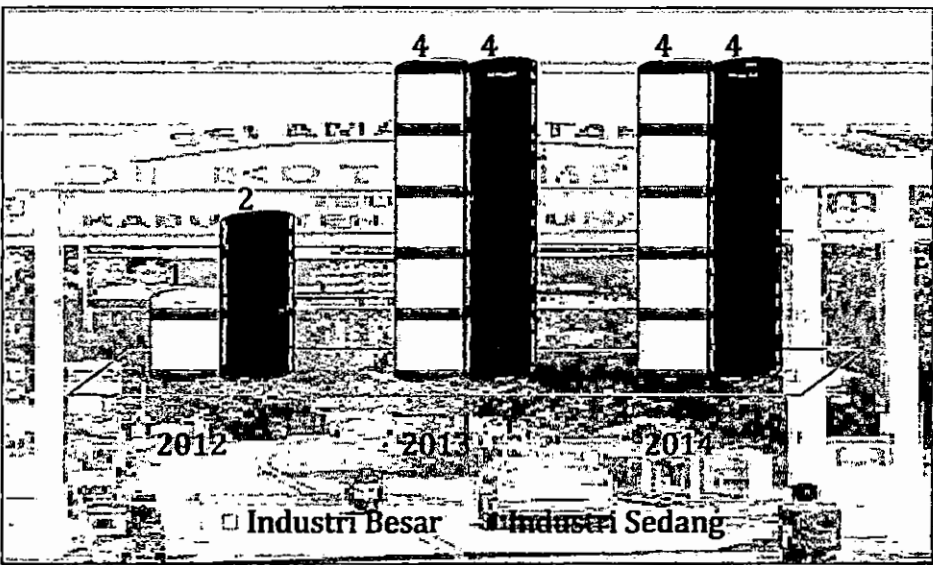
Kabupaten Tojo Una-Una yang memiliki sumberdaya alam yang melimpah sehingga memiliki peluang yang besar sebagai daerah tujuan investasi khususnya pada pengembangan sumber daya alam di daerah. Proses peningkatan daya tarik investasi ini memerlukan dukungan infrastruktur yang memadai, sehingga daerah memiliki daya saing yang tinggi dalam menarik minat investor dan para invesator dapat meningkatkan efisiensi operasionalnya.

Selain industri pariwisata, berdasarkan data BPS, terlihat pula bahwa terdapat 3 jenis industri yang cukup berkembang di Kabupaten Tojo Una-Una yaitu industri aneka; industri logam, mesin dan kimia; industri hasil pertanian dan

kehutanan. Perkembangan ketiga jenis industri tersebut dalam kurun waktu 2009-2011 dapat disajikan sebagai berikut :

Peranan industri pengolahan di Kabupaten Tojo Una-Una tidak mengalami perkembangan positif meskipun masih menjadi sektor terbesar ketiga dalam struktur ekonomi Kabupaten Tojo Una-Una. Infrastruktur yang mendukung ditengarai masih belum memadai dalam menstimulasi pertumbuhan industri pengolahan di Kabupaten Tojo Una-Una. Pada tahun 2014, peranan industri pengolahan mencapai 9 persen dari perekonomian Kabupaten Tojo Una-Una.

Ditinjau dari skala usaha, jenis industri pengolahan yang diminati masyarakat Kabupaten Tojo Una-Una sebagai pilihan usahanya adalah yang tergolong dalam kelompok Industri Mikro dan Industri Kecil (IMK), yaitu industri dengan jumlah pekerja kurang dari 20 pekerja. Pada tahun 2014, kelompok Industri Besar/Sedang (IBS) hanya berjumlah 8 unit yang terdiri dari 1 unit industri besar yang terletak di Kecamatan Tojo Barat, 2 unit di Kecamatan Tojo, 1 Unit di Kecamatan Ampana Tete. Sedangkan industri sedang berjumlah 4 unit yang semuanya terletak di Kecamatan Ampana Tete.



Sumber : BPS Kabupaten Tojo Una-Una 2015

Grafik 5.1
Jumlah Industri Besar dan Sedang di Kabupaten Tojo Una-Una menurut Kecamatan, 2012 - 2014

2. Tenaga kerja

Selain aspek pertumbuhan ekonomi secara umum, tujuan investasi adalah untuk meningkatkan serapan tenaga kerja ditengah tingginya perkembangan angkatan kerja yang ada di Kabupaten Tojo Una Una. Tujuan pengembangan

investasi di daerah dimaksudkan untuk menciptakan lapangan kerja dalam jangka panjang sehingga tumbuhnya industri di daerah akan seiring dengan peningkatan jumlah lapangan kerja, pengurangan pengangguran, peningkatan kesejahteraan masyarakat. Industri yang bersifat padat karya akan memberikan lebih banyak peluang serapan tenaga kerja dibanding sektor yang kapital insentif. Sifat industri yang di daerah yang masih mendasarkan pada *natural resources oriented*, lebih memberikan peluang bagi serapan tenaga kerja lokal, karena sifat pekerjaannya yang relatif mudah dan tidak memerlukan skill yang tinggi. Karakteristik ini sesuai dengan ketersediaan kualitas tenaga kerja di daerah yang relatif belum *skilled*, tingkat pendidikan yang rendah, serta tingkat persaingan antar pencari kerja yang rendah pula.

Selama tiga tahun terakhir, dari total penduduk usia kerja (usia 15 tahun ke atas), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Tojo Una-Una naik dari 76,27 persen di tahun 2013 menjadi 76,39 persen di tahun 2014. Kenaikan ini diakibatkan oleh bertambahnya penduduk usia kerja yang bekerja dalam periode yang sama yaitu dari 74,58 persen menjadi 76,28 persen.

Tabel 5.1
Statistik Ketenagakerjaan Kabupaten Tojo Una-Una
Tahun 2012-2014

Uraian	2012	2013	Feb- 14
TPAK (%)	72,39	76,27	76,39
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	1,65	2,23	1,31
Kesempatan Kerja	98,38	97,78	98,69
Penduduk Bekerja	71,19	74,58	76,28

Sumber : BPS Kabupaten Tojo Una-Una 2015

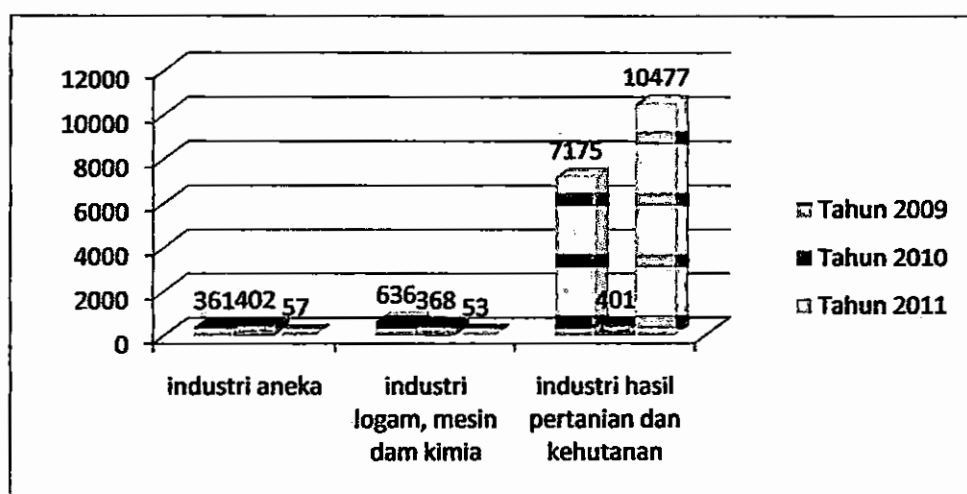
Pasar tenaga kerja di Kabupaten Tojo Una-Una juga diwarnai dengan tingginya angka kesempatan kerja. Tingkat Kesempatan Kerja Kabupaten Tojo Una-Una pada tahun 2014 mencapai 98,69 persen atau naik sekitar 0,91 persen dibandingkan tahun 2013. Implikasi dari hal tersebut adalah menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Tojo Una-Una pada tahun 2014. TPT pada tahun 2013 adalah 2,22 persen menurun menjadi 1,31 persen pada tahun 2014. Sebagai wilayah dengan potensi alam yang cukup besar, sektor pertanian,

perkebunan, kehutanan, perburuan dan perikanan menjadi pilihan utama masyarakat di Kabupaten Tojo Una-Una sebagai tempat mata pencaharian.

Pada tahun 2014, persentase tenaga kerja di sektor ini mencapai 55,71 persen. Selanjutnya diikuti oleh sektor jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan dengan persentase serapan tenaga kerja sebesar 15,91 persen. Sedangkan persentase tenaga kerja yang terserap di sektor industri hanya sebesar 5,49 persen.

3. Nilai Investasi Bidang Industri

Pertumbuhan investasi di Kabupaten Tojo Una Una dapat dilihat dari nilai invesatsi yang ditanamkan. Dalam kurun waktu 3 tahun dari tahun 2009 hingga tahun 2013, nilai investasi pada jenis industri hasil pertanian daan kehutanan masih mendominasi. Nilai investasi industri di Kabupaten Tojo Una Una dapat disajikan pada Grafik 5.3. Dari grafik 5.3 nampak adanya perkembangan yang cukup baik untuk nilai investasi pada jenis industri hasil pertanian, dan kehutanan. Dibanding tahun 2009, nilai investasi di tahun 2011 meningkat sebesar 46 %. Ini memberikan signal bahwa peluang berkembangnya investasi pada jenis industri ini masih cukup baik. Ketersediaan bahan baku yang melimpah merupakan salah satu daya tarik industri ini dibanding industri lainnya.



Grafik 5.3: Nilai investasi industri di Kabupaten Tojo Una Una 2009-2011 (dalam Juta)

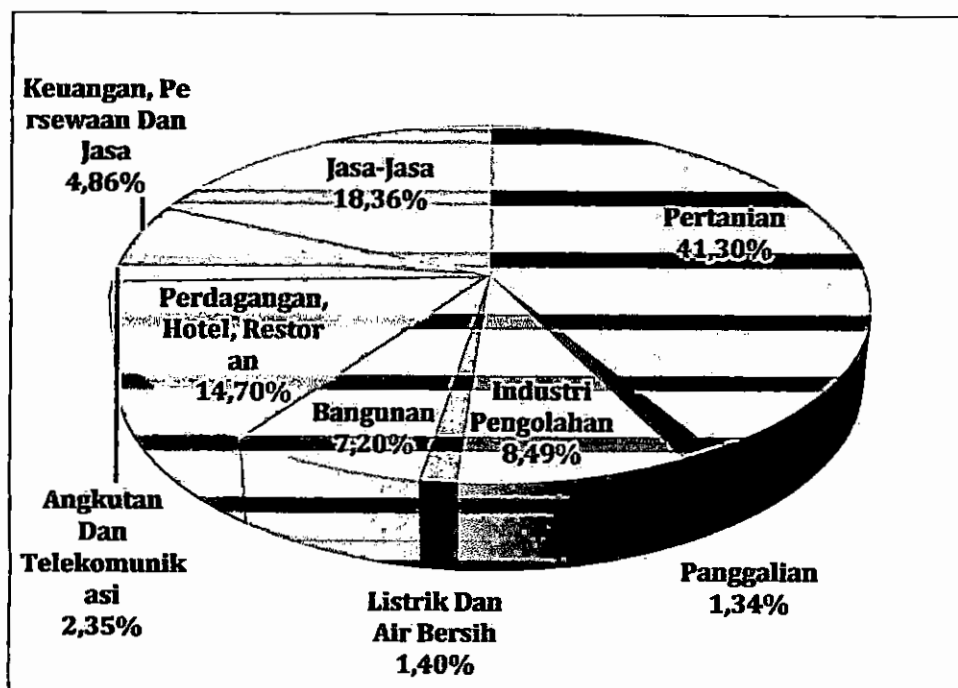
Untuk industri aneka, di tahun 2010 menunjukkan adanya peningkatan nilai investasi sebesar 11 persen meskipun di tahun 2011 justru menunjukkan penurunan hingga 85 persen. Untuk industri logam, data menunjukkan adanya penurunan secara terus menerus. Di tahun 2010, industri kimia turun 42 persen, sementara di tahun 2011 penurunan justru semakin besar yaitu 85 persen dibanding tahun 2010.

4. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dilihat dari sejauhmana pertumbuhan PDRB yang merupakan nilai seluruh faktor produksi pada semua sektor ekonomi. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan besaran nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh berbagai aktifitas sektor ekonomi di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu (setahun). PDRB Kabupaten Tojo Una-Una atas dasar harga berlaku tahun 2014 mencapai 2,11 triliun rupiah atau mengalami peningkatan sebesar 15,26 persen bila dibandingkan dengan tahun 2013. Seperti tahun sebelumnya, sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan menjadi penyumbang terbesar PDRB Kabupaten Tojo Una-Una pada tahun 2014, yaitu sebesar 41,11 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa ekonomi Kabupaten Tojo Una-Una masih bergantung pada sektor ini. Sedangkan sektor listrik dan air bersih memberikan kontribusi yang paling kecil yaitu hanya sebesar 1,39 persen.

Pendapatan regional per kapita Kabupaten Tojo Una-Una secara umum terus mengalami kenaikan selama tiga tahun terakhir. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan kesejahteraan masyarakat secara makro karena pendapatan regional per kapita merupakan indikator yang menjelaskan kemampuan penduduk dalam menikmati hasil- hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tojo Una-Una juga menunjukan penurunan selama tiga tahun terakhir. Pada tahun 2014 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tojo Una- Una sebesar 7,37 persen, lebih rendah dibandingkan tahun 2012 dan 2013 yaitu 8,02 persen dan 7,94 persen.

Jika dicermati, struktur PDRB Kabupaten Tojo Una Una masih didominasi oleh sektor pertanian yang mencapai lebih sekitar 41 persen dari total PDRB. Ini menggambarkan kuatnya sektor primer yang mendukung perekonomian Kabupaten Tojo Una Una. Dominiasi tersebut memberikan makna bahwa perekonomian yang ada di Kabupaten Tojo Una Una masih merupakan perekonomian yang didasarkan pada kekayaan SDA yang bertumpu pada sektor pertanian secara luas. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat merupakan salah satu faktor kurangnya pergerakan sektor lainnya. Selengkapnya, proporsi PDRB sektoran dalam 6 tahun terakhir dapat disajikan sebagai berikut :



Sumber : BPS Kabupaten Tojo Una-Una 2015

Grafik 5.1
Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
di Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2014

Sektor yang memiliki porsi terbesar kedua adalah sektor jasa-jasa yang memiliki sumbangan sekitar 18,36 persen. Sumbangan ini terutama dari sektor pemerintah yang merupakan sektor penggerak pembangunan khususnya dari aspek pelayanan pemerintahan.

Sektor ketiga yang memiliki porsi yang relatif besar adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran. Pertumbuhan sektor ini sangat terkait dengan pertumbuhan turisme di Kabupaten Tojo Una-Una. Pertumbuhan ini menjadi penting mengingat Kabupaten Tojo Una Una memiliki potensi wisata yang kuat dan menjadi prioritas pembangunan di Kabupaten Tojo Una Una. Industri pengolahan menunjukkan trend yang menurun. Kondisi ini menggambarkan adanya pertumbuhan yang lambat pada sektor pengolahan dibanding sektor lainnya, sehingga peningkatannya masih lebih kecil dibanding sektor primer (pertanian), jasa-jasa dan sektor yang terkait dengan pariwisata, terutama perdagangan hotel dan restoran.

5. Pertumbuhan PDRB.

Tingkat pertumbuhan PDRB menggambarkan peningkatan atau penurunan PDRB berdasarkan sektoralnya. Pertumbuhan PDRB di Kabupaten Tojo Una Una dalam kurun waktu 2007 hingga 2014 dapat disajikan pada Tabel 5.3

Dari data pada Tabel 5.3 terlihat bahwa sektor primer memiliki tingkat pertumbuhan yang relatif stagnan yang berkisar 7 persen dalam 5 tahun terakhir. Pertumbuhan ini memberikan makna bahwa investasi pada sektor pertanian relatif sama dari tahun ke tahun, sehingga nilai tambah yang tercipta juga relatif sama perkembangannya.

Tabel 5.3
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Bruto
Atas Dasar Harga Konstan 2000
Kabupaten Tojo Una-Una menurut Lapangan Usaha, 2010 – 2014 (%)

Sektor	2010	2011	2012	2013	2014
Pertanian	7,34	7,10	6,82	6,99	6,33
Panggalian	7,73	36,03	7,24	5,21	- 12,77
Industri Pengolahan	4,34	4,21	4,68	4,56	4,91
Listrik Dan Air Bersih	7,39	7,52	7,81	8,09	8,50
Bangunan	9,71	8,49	12,02	9,33	7,73
Perdagangan, Hotel, Restoran	9,43	9,47	9,89	9,59	9,13
Angkutan Dan Telekomunikasi	8,33	8,61	9,55	9,64	9,65
Keuangan, Persewaan Dan Jasa	8,73	8,76	8,88	8,90	9,09
Jasa-Jasa	9,38	8,98	9,29	9,76	9,64

Sumber : BPS Kabupaten Tojo Una-Una 2015

Sektor tersier seperti angkutan dan telekomunikasi, sektor perdagangan, hotel dan restoran menunjukkan peningkatan yang cukup baik. Kondisi ini memberikan signal adanya pergeseran arah ekonomi yang berasal dari sektor primer ke sektor sekunder lainnya. Pertumbuhan pada industri pariwisata di Kabupaten Tojo Una-Una memberikan andil terhadap pembentukan PDRB di Kabupaten Tojo Una-Una.

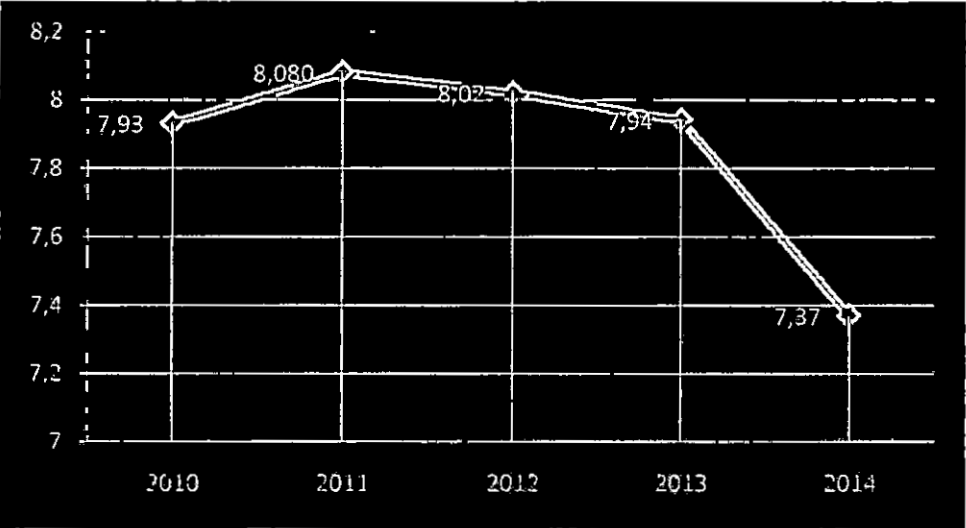
Di tahun 2014, sektor penggalian terjadi pertumbuhan negatif mencapai - 12.77 persen. penurunan ini tidak terlepas kebijakan pemerintah dalam bidang pertambangan, yaitu pelarangan impor atau perdagangan barang mineral keluar negeri. Pada Kabupaten Tojo Una Una yang memiliki potensi bijih besi dan pertambangan logam lainnya yang mulai memproduksi mulai merasakan hal tersebut, karena belum membangun smelter atau pengolahan biji besi menjadi bahan setengah jadi.

Peraturan pemerintah yang mewajibkan adanya industri smelter di dalam negeri, berpeluang akan menurunkan ekspor produk pertambangan di Kabupaten Tojo Una-Una yang selama ini masih mengekspor produk tambang mentah (belum diolah menjadi bijih tambang).

6. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Perkembangan perekonomian di Kabupaten Tojo Una Una menunjukkan kondisi yang menurun sejak tahun 2012 hingga tahun 2014. Akan tetapi pertumbuhannya masih di atas rata rata pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam

kurun waktu 2010 hingga 2014. Pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Tojo Una Una berada di atas 7 persen. Pertumbuhan ini menunjukkan adanya perbaikan kinerja pemerintahan dalam menggerakkan seluruh stakeholder yang berdampak pada peningkatan nilai tambah seluruh sektor di Kabupaten Tojo Una Una. Pertumbuhan PDRB di Kabupaten Tojo Una-Una dapat disajikan sebagai berikut:

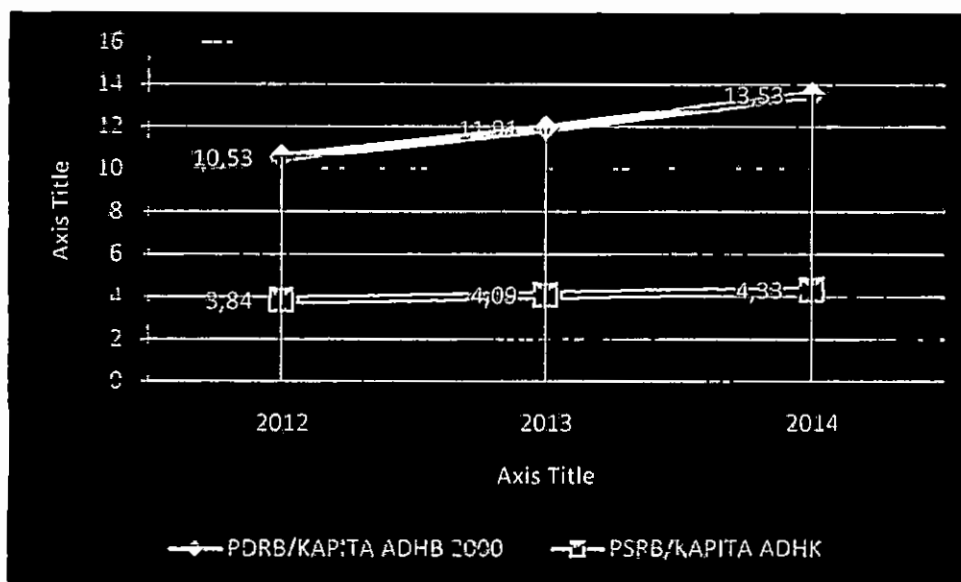


Sumber : BPS Kabupaten Tojo Una-Una 2015

Grafik 5.4
Pertumbuhan PDRB di Kabupaten Tojo Una Una

Dari grafik pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tojo Una Una di atas, terlihat bahwa setiap tahun pertumbuhannya negatif dan menunjukkan trend penurunan secara signifikan. Pertumbuhan PDRB dalam jangka panjang berarti pula menggambarkan adanya penurunan perekonomian atau kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu kiranya pemerintah untuk mengantisipasi penurunan tersebut melalui kebijakan yang berorientasi penciptaan kegiatan ekonomi,

Perkembangan tingkat kesejahteraan dalam aspek ekonomi dapat pula dilihat dari perkembangan PDRB per kapita. PDRB perkapita adalah nilai PDRB per penduduk di suatu daerah. Perkembangan DPRB per Kapita di Kabupaten Tojo Una Una dapat disajikan sebagai berikut :



Sumber : BPS Kabupaten Tojo Una-Una 2015

Grafik 5.5
PDRB per kapita Kabupaten Tojo Una Una

Dari grafik diatas terlihat bahwa perkembangan PDRB menunjukkan trend peningkatan. Jika ditahun 2012 PDRB perkapita adalah 10,53 juta per orang, ditahun 2013 PDRB per kapita meburut ADHB 200 di Kabupaten Tojo Una Una meningkat menjadi 11,91 juta per orang demikian pula PDRB ADHK. Peningkatan PDRB ini adalah cerminan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tojo Una Una yang makin baik. Pertumbuhan PDRB yang meningkat juga memberikan informasi bahwa meskipun terjadi peningkatan jumlah penduduk, namun pertumbuhan PDRB masih lebih tinggi dari pertumbuhan penduduk di Kabupaten Tojo Una Una.

5.2 Fasilitas Pendukung Investasi

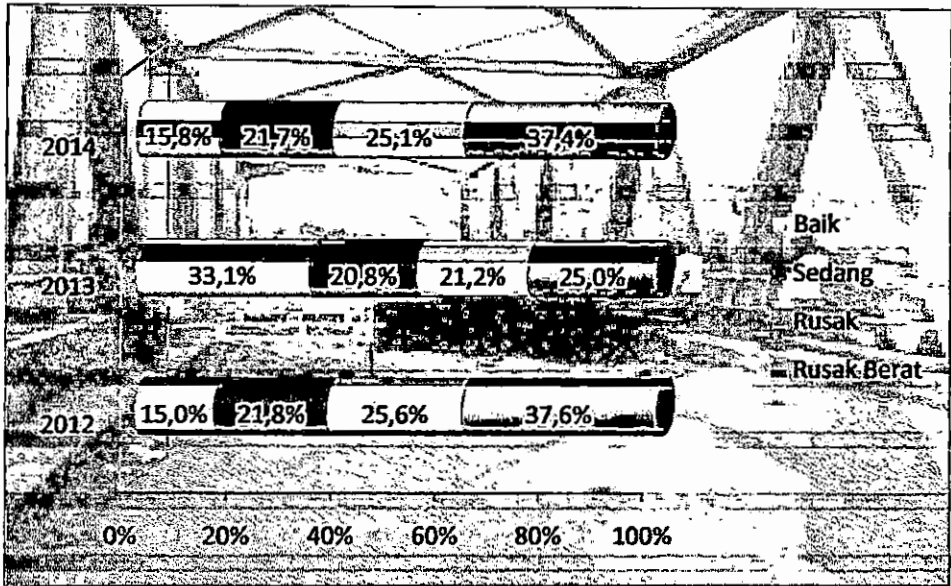
1. Infrastruktur Transportasi Darat

a. Kondisi Jalan

Saat ini prasarana transportasi utama yang di Kabupaten Tojo Una-Una adalah prasarana transportasi darat dan laut. Kondisi prasarana jalan saat ini masih belum memadai bagi kendaraan dengan muatan besar. Walaupun keseluruhan jalan trans antar kabupaten telah diaspal namun kondisi medan yang cukup berat mengakibatkan banyaknya jalan yang rusak. Kondisi prasarana jalan saat ini di Kabupaten Tojo Una-Una dapat dilihat dari Grafik 5.6 kondisi jalan di Kabupaten Tojo Una-Una pada tahun 2011.

Data di atas menunjukkan bahwa pada Tahun 2014 sebagian besar atau 37,4 persen kondisi jalan di Kabupaten Tojo Una-Una dalam kondisi rusak berat,

hanya sebesar 15,8 persen jalan yang berada pada kondisi baik. Hal ini tentunya perlu menjadi perhatian pemerintah daerah mengingat 88,5 persen panjang jalan yang ada di Kabupaten Tojo Una-Una berstatus jalan kabupaten, sehingga menjadi kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah untuk memperbaiki kondisi jalan yang ada di Kabupaten Tojo Una-Una untuk mendukung tumbuhnya kegiatan ekonomi melalui investasi.



Sumber : BPS Kabupaten Tojo Una-Una 2015

Grafik 5.6
Kondisi Jalan di Kabupaten Tojo Una-Una 2014

Prasarana jalan merupakan salah satu yang menjadi perhatian para investor dalam menanamkan modalnya di suatu daerah. Kurang memadainya prasarana jalan yang terdapat di suatu daerah akan mengurangi daya tarik investasi, hal ini di karenakan meningkatnya waktu tempuh, meningkatnya biaya pemeliharaan sarana transportasi dan kesulitan dalam penyaluran distribusi barang.

Upaya perbaikan perlu ditempuh guna meningkatkan daya tarik penanaman modal di Kabupaten Tojo Una-Una, tentunya ini juga menjadi komitmen bersama antara pemerintah, masyarakat dan pelaku bisnis untuk masing-masing berperan dalam menjaga dan memelihara sarana jalan yang telah disediakan pemerintah.

Infrastruktur di setiap daerah merupakan hal yang sangat penting guna meningkatkan kesejahteraan rakyat, salah satunya tersedianya jalan-jalan yang akan sangat membantu berkembangnya suatu wilayah. Total panjang jalan di Kabupaten Tojo Una-Una pada tahun 2014 mencapai 2.239,71 km, dimana baru 18 persen yang sudah di aspal, sedangkan lainnya masih berupa jalan berkerikil

sebesar 35,54 persen dan jalan tanah sebesar 46,67 persen. Jika dilihat menurut statusnya, sebagian besar jalan di Kabupaten Tojo Una-Una merupakan jalan kabupaten yaitu mencapai 1.983,71 km, sedangkan sisanya merupakan jalan negara dengan panjang 190 km dan jalan propinsi dengan panjang 66 km. Pada tahun 2014 hanya 15,78 persen jalan di Kabupaten Tojo Una-Una yang berkondisi baik.

b. Sarana Angkutan Darat

Sarana angkutan darat di Kabupaten Tojo Una-Una masih relatif kurang memadai baik dari segi jumlah maupun kualitas sarana angkutannya. Ha ini dapat dilihat seperti pada Tabel 5.5

Tabel 5.5
Jumlah Sarana Transportasi Umum di Kabupaten Tojo Una-Una
Tahun 2012-2014

	2012	2013	2014
Mobil	49	136	148
Penumpang			
Bus	-	-	-
Truk	131	88	289
Pic Up	163	60	338
Tangki	9		7
Triseda	17	15	8

Sumber : BPS Kabupaten Tojo Una-Una 2015

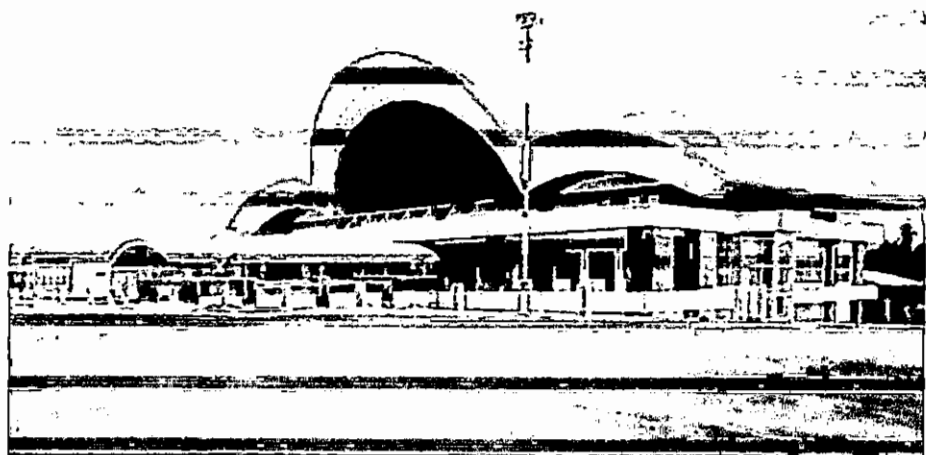
Dalam periode 2012-2014, jumlah kendaraan yang wajib uji di Kabupaten Tojo Una- Una mengalami kenaikan yang signifikan dari 299 unit pada tahun 2013 menjadi 840 unit pada tahun 2014. Pada tahun 2014, jumlah kendaraan wajib uji di Kabupaten Tojo Una-Una terdiri dari 148 unit mobil penumpang, 289 unit truk, 388 unit pick up, dan 7 unit mobil tangki dan 8 unit triseda.

1. Infrastruktur Udara

Peningkatan aksibilitas daerah terus ditingkatkan melalui upaya pembangunan transportasi udara di Kabupaten Tojo Una-Una. Upaya ini membuahkan hasil dengan adanya penandatanganan Kesepakatan Bersama Antara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una

[Handwritten signature]

tentang Pembangunan dan Pengembangan Bandar Udara Baru Tojo Una-Una di Kabupaten Tojo Una-Una Provinsi Sulawesi Tengah



Bandara Tanjung Api Kabupaten Tojo Una-Una

Kabupaten Tojo Una-Una juga telah memperlihatkan kesungguhan dalam membangun Pembangunan fasilitas Bandar Udara (Bandara), dengan mengalokasikan dana pendamping melalui APBD bernilai milyaran rupiah.

Letak bandara udara Kabupaten Tojo Una-Una ini adalah di Kecamatan Ampana Tete dengan luas 168,1 Hektar Keberadaan bandara udara ini akan meningkatkan aksibilitas Kabupaten Tojo Una-Una menuju daerah lain dengan lebih cepat.

2. Transportasi Laut

Selain transportasi darat, transportasi laut juga merupakan sarana tranpsortasi yang menghubungkan wilayah kepulauan di Kabupaten Tojo Una-Una. Berdasarkan data Dinas Perhubungan Darat, Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Tojo Una-Una jumlah trasnpsortasi laut yang terdaftar di pada Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

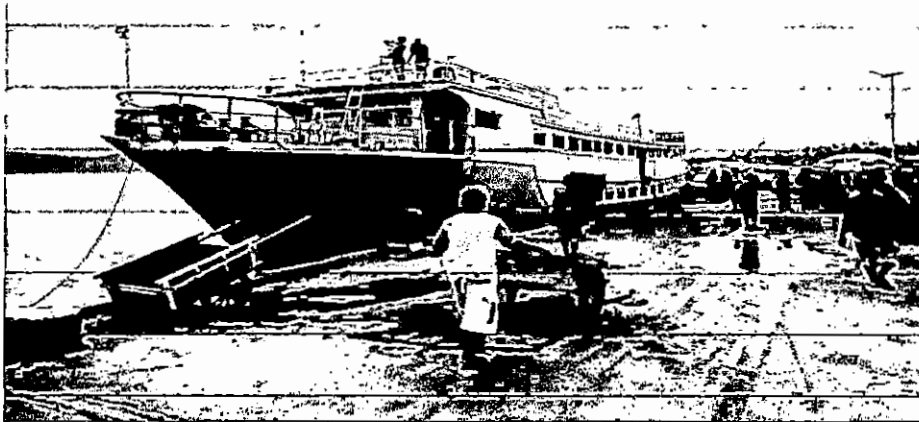
Tabe 5.6
Jumlah sarana Transportasi Laut
di Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2014

No	Jenis Transportasi	Jumlah
1	Speed Boat	16
2	Angkutan Penumpang kavasitas -7GT	28
3	Angkutan Penumpang dan Barang	24

Sumber : Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informastika Kabupaten Tojo Una-Una

[Handwritten signature]

Apabila ditinjau dari tingkat kecukupan transportasi laut di Kabupaten Tojo Una-Una saat ini masih belum memadai. Meningkatnya mobilitas penduduk antar pulau juga meningkatnya arus wisata menuntut adanya penambahan transportasi laut massal yang dapat terjangkau dan cepat. Peluang investasi di bisnis transportasi akan tinggi dengan telah dibukanya bandara udara di Ampana Tete dan perbaikan jalur darat menuju Kabupaten Tojo Una-Una.



3. Listrik dan Air

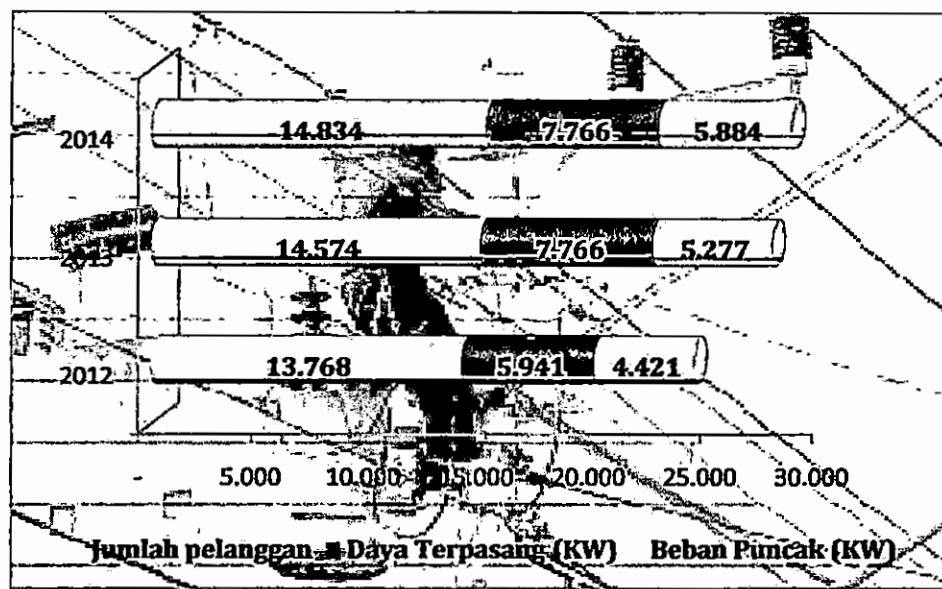
a. Sumber Daya Listrik

Listrik merupakan salah satu daya tarik investasi dalam jangka panjang. Ketersediaan listrik merupakan salah satu faktor penting dalam proses investasi terlebih jika investasinya adalah berfokus pada pengembangan industri pengolahan. Ketersediaan tenaga listrik di banyak daerah masih menimbulkan masalah tidak saja pada jumlahnya, namun juga kontinuitasnya. Ketersediaan listrik yang berasal dari tenaga diesel umumnya memiliki kontinuitas pasokan yang kurang stabil, baik dari segi harga maupun dari segi kontinuitas produksinya. Ini menyebabkan sumber tenaga listrik yang berasal dari gas alam dan air menjadi sumber daya energi alternatif bagi industri.

Ketersediaan energi listrik yang memadai dan berkesinambungan menjadi hal yang sangat penting untuk menggerakkan roda perekonomian karena energi listrik mempunyai peran vital yaitu sebagai sumber penerangan dan energi lain baik di sektor rumah tangga maupun industri. Sejalan dengan meningkatnya jumlah pelanggan PLN di Kabupaten Tojo Una-Una yang mencapai 14.834 pelanggan pada tahun 2014, produksi

listrik PLN juga meningkat menjadi 27.638.449 KWH atau meningkat sekitar 84,08 persen dari tahun 2010.

Daya yang terpasang pada tahun 2014 tidak mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2013 yaitu 7.766 KW. Bertambahnya jumlah pelanggan dengan daya yang terpasang tidak bertambah mengakibatkan beban puncak pada tahun 2014 meningkat menjadi 5.884 KW dari 5.277 KW pada tahun 2013.



Sumber : BPS Kabupaten Tojo Una-Una 2015

Grafik 5.7
Daya Terpasang dan Beban Puncak Tenaga Listrik
di Kabupaten Tojo Una-Una

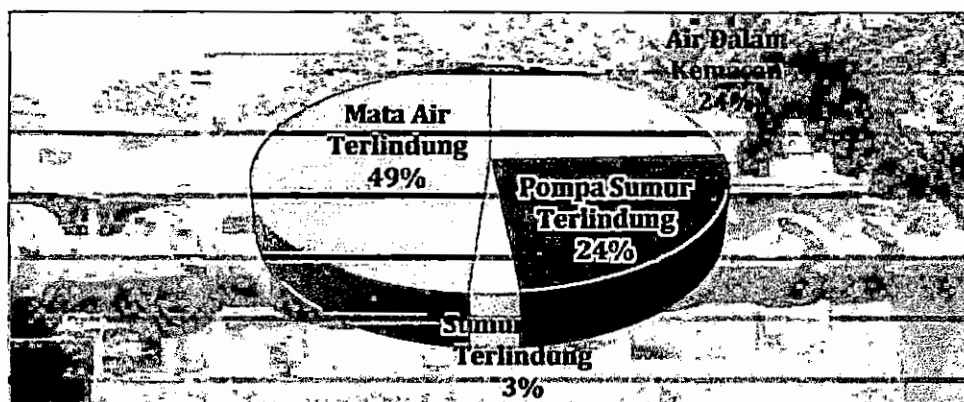
Grafik di atas memperlihatkan bahwa hingga saat ini listrik yang di pasok oleh PLN di Kabupaten Tojo Una Una masih mencukupi. Hal ini terlihat dari besarnya daya terpasang yang lebih besar dari kapasitas beban puncak. Namun demikian jika dilihat kemampuan layanannya terlihat makin menunjukkan penurunan. Hal penting yang perlu dicermati adalah daya terpasang yang tetap pada tahun 2013 hingga tahun 2014 dengan jumlah pelanggan yang semakin besar, ini merupakan signal yang kurang menggembirakan dalam konteks penyediaan listrik untuk menarik investor, karena listrik merupakan sumber energi utama yang diperlukan dalam mengembangkan investasi industri pengolahan di Kabupaten Tojo Una Una, terlebih pemikiran untuk membangun kawasan industri di Kabupaten Tojo Una-Una makin intensif. Adalah sangat penting untuk melakukan

peningkatan kapasitas tenaga listrik melalui pemanfaatan sumber alternatif lain seperti PLTA, PLTMH, energi listrik panas bumi, yang relatif tersedia dan belum dimanfaatkan di Kabupaten Tojo Una-Una.

Dengan peningkatan energi listrik dalam jangka panjang terutama dari sumber terbarukan dan ramah lingkungan, maka akan mendorong investasi dan pertumbuhan industri di Kabupaten Tojo Una Una dalam jangka panjang. Diperlukan penguatan koordinasi antar stakeholder, baik swasta maupun pemerintah untuk memanfaatkan sumber energi alternatif dalam penyediaan listrik di daerah.

b. Sumber Daya Air Bersih

Peningkatan akses layanan air swasta (air dalam kemasan) dan pemerintah, kemampuan daya beli serta kesadaran masyarakat akan air bersih membuat persentase rumah tangga di Kabupaten Tojo Una-Una yang mengkonsumsi air bersih meningkat. Selama tahun 2013-2014, persentase rumah tangga yang mengambil air minum dari mata air dan air dalam kemasan dan air leding menurun, sedangkan persentase rumah tangga yang memilih air minumnya berasal dari sumur meningkat. Untuk rumah tangga yang menggunakan air dari sumur pompa/bor dan sumur terlindung sebagai sumber air minumnya meningkat 6,28 persen



Sumber : BPS Kabupaten Tojo Una-Una 2015

Grafik

Persentase Rumah Tangga menurut Sumber Air Minum di Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2014

5.3 Analisis Lingkungan Strategis Pengembangan Penanaman Modal Kabupaten Tojo Una-Una

Desain sebuah strategi harus didasarkan pada kondisi nyata yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam pengembangan investasi. Pengembangan penanaman modal merupakan wujud rencana spesifik yang didasarkan pada aspek internal diperhadapkan pada kondisi lingkungan extrnal. Dalam kondisi ini setiap daerah dapat mendesain strategi yang berbeda meskipun kondisi eksternalnya sama,

mengingat potensi sumberdaya manusia, SDA, fasilitas yang dimiliki oleh setiap Pemerintah daerah berbeda.

Berdasarkan atas telaah lingkungan strategis di Kabupaten Tojo Una-Una, dapat diidentifikasi faktor-faktor internal (*internal factor analysis summary*) maupun faktor faktor external (*external factor analysis summary*) yang merupakan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman pengembangan penanaman modal di Kabupaten Tojo Una-Una, yang dapat di jabarkan sebagai berikut:

a. Kekuatan :

1. Potensi Sumber daya alam daerah cukup memadai dalam menunjang investasi.
2. Daya tarik wisata yang telah dikenal secara nasional dan internasional.
3. Sarana dan prasarana instansi pendukung investasi yang respresentatif tersedia.
4. Kepastian hukum dan keamanan cukup mendukung Iklim investasi
5. Dukungan sosial budaya masyarakat dalam berusaha di sektor agro
6. Luas dan kondisi wilayah pengembangan investasi potensi daerah cukup mendukung

b. Kelemahan

1. Belum memadainya sarana transportasi yang menunjang transportasi ke luar daerah.
2. Belum maksimalnya pelayanan satu atap dalam proses investasi.
3. Tingkat ketrampilan tenaga kerja yang masih rendah dalam mendukung aktivitas bisnis.
4. Keterbatasan listrik dalam menunjang aktivitas bisnis
5. Koordinasi antar instansi atas program yang mendorong penanaman modal kurang terwujud.
6. Pemanfaatan database untuk pemasaran komoditas belum tersosialisasi dengan baik.

c. Peluang

1. Dukungan pemerintah pusat dalam pengembangan energi ramah lingkungan dan terbarukan
2. Adanya kebijakan pengelolaan tambang dalam negeri melalui pembentukan industri smelter di daerah penghasil
3. Beroperasinya bandar udara di Kabupaten Tojo Una-Una
4. Berkembangnya pasar agrobisnis khususnya di Gorontalo
5. Jaringan kerjasama dalam menggaet investasi PMA dan PMDN
6. Peningkatan penggunaan jaringan komunikasi dalam bisnis dan investasi

d. Ancaman

- 1. Terbentuknya kawasan industri di beberapa kawasan di Indonesia
- 2. Makin kompetitifnya komoditas unggulan daerah lainnya.
- 3. Sindikasi penguasaan pasar komoditas oleh kelompok bisnis atau negara tertentu.
- 4. Kurang siapnya kerjasama dunia usaha di tingkat lokal.

Berdasarkan pada daftar kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman, maka dapat disajikan matrik analisis lingkungan sebagai berikut :

Tabel 5.1 Analisis Internal dan Eksternal

INTERNAL	EXTERNAL
Kekuatan <ul style="list-style-type: none">1. Potensi Sumber daya alam daerah cukup memadai dalam menunjang investasi.2. Daya tarik wisata yang telah dikenal secara nasional dan internasional.3. Sarana dan prasarana instansi pendukung investasi yang respresentatif tersedia.4. Kepastian hukum dan keamanan cukup mendukung Iklim investasi5. Dukungan sosial budaya masyarakat dalam berusaha di sektor agro6. Luas dan kondisi wilayah pengembangan investasi potensi daerah cukup mendukung7. Beroperasinya bandar udara di Kabupaten Tojo Una-Una	Peluang <ul style="list-style-type: none">1. Dukungan pemerintah pusat dalam pengembangan energi ramah lingkungan dan terbarukan2. Adanya kebijakan pengelolaan tambang dalam negri melalui pembentukan industri smelter di daerah penghasil3. Berkembangnya pasar agrobisnis khususnya di Gorontalo4. Jaringan kerjasama dalam menggaet investasi PMA dan PMDN5. Peningkatan penggunaan jaringan komunikasi dalam bisnis dan investasi
Kelemahan <ul style="list-style-type: none">1. Belum memadainya sarana transportasi yang menunjang transportasi ke luar daerah.2. Belum maksimalnya pelayanan satu atap dalam proses investasi.3. Tingkat ketrampilan tenaga kerja yang masih rendah dalam mendukung aktivitas bisnis.4. Keterbatasan listrik dalam menunjang aktivitas bisnis5. Koordinasi antar instansi atas program yang mendorong penanaman modal kurang terwujud.6. Pemanfaatan database untuk pemasaran komoditas belum tersosialisasi dengan baik.	Ancaman <ul style="list-style-type: none">1. Terbentuknya kawasan industri di beberapa kawasan di Indonesia2. Makin kompetitifnya komoditas unggulan daerah lainnya.3. Sindikasi penguasaan pasar komoditas oleh kelompok bisnis atau negara tertentu.4. Kurang siapnya kerjasama dunia usaha di tingkat lokal

Handwritten signature/initials.

Berdasarkan hasil scanning kondisi penanaman modal di Kabupaten Tojo Una-Una dapat diidentifikasi memiliki 6 kekuatan (S), 6 Kelemahan (W), 6 Peluang (O), dan 4 Ancaman (T). Dalam upaya mengoptimalkan pelaksanaan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Tojo Una-Una, maka perlu desain strategi dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan pencermatan terhadap hal-hal yang berpengaruh yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal dalam bentuk kekuatan (*strenght*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunity*) dan ancaman (*threat*). Hasil scanning kondisi lingkungan strategis tersebut selanjutnya dijadikan dasar melakukan desain strategi pengembangan penanaman modal di Kabupaten Tojo Una Una yang dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 5.2 Matrik IFAS DAN EFAS Potensi Investasi

	Kekuatan	Kelemahan
IFAS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Potensi Sumber daya alam daerah cukup memadai dalam menunjang investasi. 2. Daya tarik wisata yang telah dikenal secara nasional dan internasional. 3. Sarana dan prasarana instansi pendukung investasi yang respresentatif tersedia. 4. Kepastian hukum dan keamanan cukup mendukung Iklim investasi 5. Dukungan sosial budaya masyarakat dalam berusaha di sektor agro 6. Luas dan kondisi wilayah pengembangan investasi potensi daerah cukup mendukung 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum memadainya sarana transportasi yang menunjang transportasi ke luar daerah. 2. Belum maksimalnya pelayanan satu atap dalam proses investasi. 3. Tingkat ketrampilan tenaga kerja yang masih rendah dalam mendukung aktivitas bisnis. 4. Keterbatasan listrik dalam menunjang aktivitas bisnis 5. Koordinasi antar instansi atas program yang mendorong penanaman modal kurang terwujud. 6. Pemanfaatan database untuk pemasaran komoditas belum tersosialisasi dengan baik.
EFAS		
Peluang	Strategi SO	Strategi WO
<ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan pemerintah pusat dalam pengembangan energi ramah lingkungan dan terbarukan 2. Adanya kebijakan pengelolaan tambang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan UMKM berbasis potensi daerah 2. Penyiapan kawasan industri yang mampu menampung berbagai industri, baik industri besar maupun UMKM 3. Pengembangan sistem 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 2. Penyediaan infrastruktur pendukung investasi daerah 3. Optimalisasi

<p>dalam negeri melalui pembentukan industri smelter di daerah penghasil</p> <p>3. Siap beroperasinya bandar udara di Kabupaten Tojo Una-Una</p> <p>4. Berkembangnya pasar agrobisnis khususnya di Gorontalo</p> <p>5. Jaringan kerjasama dalam menggaet investasi PMA dan PMDN</p> <p>6. Peningkatan penggunaan jaringan komunikasi dalam bisnis dan investasi</p>	<p>pendidikan yang menitikberatkan pada pengembangan kreativitas untuk mendukung tumbuhnya industri kreatif</p>	<p>pemanfaatan sumber energi terbarukan</p>
Ancaman	Strategi ST	Strategi WT
<p>1. Terbentuknya kawasan industri di beberapa kawasan di Indonesia</p> <p>2. Makin kompetitifnya komoditas unggulan daerah lainnya.</p> <p>3. Sindikasi penguasaan pasar komoditas oleh kelompok bisnis atau negara tertentu.</p> <p>4. Kurang siapnya kerjasama dunia usaha di tingkat lokal</p>	<p>1. Penguatan komunikasi/promosi potensi penanaman modal daerah</p> <p>2. Mendesain sistem rantai nilai yang mendukung penguatan cluster industri berbasis pada keunggulan daerah (mengacu pada produk inti daerah)</p>	<p>1. Menumbuhkan kembangkan ekonomi berbasis inovasi dan kreatifitas</p> <p>2. Penguatan teknologi informasi pada seluruh sektor pembangunan</p> <p>4. Optimalisasi sistem informasi potensi unggulan daerah</p>

Berdasarkan matriks EFAS dan IFAS di atas terlihat beberapa strategi dalam menjawab berbagai kondisi internal dan eksternal dalam pengembangan investasi di Kabupaten Tojo Una Una, yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Strategi SO

Strategi SO (*strenght-Opportunity*) adalah strategi yang didesain dalam proses pengembangan investasi di Kabupaten Tojo Una Una kaitannya dalam memanfaatkan peluang yang tersedia dengan segenap kekuatan yang dimiliki Kabupaten Tojo Una Una. Kaitan dengan itu, maka terdapat beberapa strategi SO yang dapat diimplemnatsikan yaitu :

- Pengembangan UMKM berbasis potensi daerah

- Penyiapan kawasan industri yang mampu menampung berbagai industri, baik industri besar maupun UMKM
- Pengembangan sistem pendidikan yang menitikberatkan pada pengembangan kreativitas untuk mendukung tumbuhnya industri kreatif.

2. Strategi ST

Strategi ST (*Strength - Threat*) adalah strategi yang didesain untuk memanfaatkan seluruh kekuatan dalam mengurangi ancaman. Untuk itu, strategi yang dapat diimplementasikan dalam pengembangan investasi di Kabupaten Tojo Una-Una adalah :

- Penguatan komunikasi/promosi potensi penanaman modal daerah
- Mendesain sistem rantai nilai yang mendukung penguatan cluster industri berbasis pada keunggulan daerah (mengacu pada produk inti daerah).

3. Strategi WO

Strategi WO (*weaknes-opportunity*) dikembangkan untuk mengurangi kelemahan dengan mengambil peluang yang ada. Strategi WO terpilih adalah :

- Optimalisasi penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
- Penyediaan infrastruktur pendukung investasi daerah
- Optimalisasi pemanfaatan sumber energi terbarukan yang

4. Strategi WT

Strategi WT (*Weakness-Threat*) dikembangkan untuk mengurangi kelemahan dan menghindari ancaman yang timbul. Strategi WT dalam pengembangan investasi di Kabupaten Tojo Una-Una adalah sebagai berikut :

- Menumbuh kembangkan ekonomi berbasis inovasi dan kreatifitas
- Penguatan teknologi informasi pada seluruh sektor pembangunan
- Optimalisasi sistem informasi potensi unggulan daerah

5.4 Fase-Fase Pengembangan Penanaman Modal di Kabupaten Tojo Una-Una

Peta Panduan pengembangan penanaman modal di Kabupaten Tojo Una-Una di bagi dalam 4 fase pengembangan, dimana masing –masing fase merupakan target capaian dan arah pelaksanaan kegiatan yang diprogramkan dalam roadmap pengembangan penanaman modal Kabupaten Tojo Una-Una. Berikut fase pengembangan penanaman modal Kabupaten Tojo Una-Una

5.4.1 Fase Pengembangan Penanaman Modal yang Relatif mudah dan Cepat Menghasilkan

Fase pertama rencana umum pengembangan penanaman modal daerah merupakan fase jangka pendek, dimana dalam fase ini target capaian

pengembangan penanaman modal adalah mendorong dan memfasilitasi penanaman modal yang siap menanamkan modalnya baik penanaman modal baru maupun perluasan usaha. Adapun langkah strategi daerah yang perlu diambil adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
2. Optimalisasi sistem informasi potensi unggulan daerah
3. Pengembangan UMKM berbasis potensi daerah
4. Penguatan komunikasi/promosi potensi penanaman modal daerah

Langkah strategi yang ditempuh dalam fase pertama ini diarahkan untuk membangun iklim yang kondusif bagi penanaman modal, sehingga dapat mencapai pertumbuhan penanaman modal yang relatif cepat serta mudah. Tindak lanjut strategi dalam bentuk program dan kegiatan dalam fase ini dapat di jabarkan sebagai berikut:

1. Optimalisasi penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Program	Kegiatan	Keterangan
Penguatan kelembagaan PTSP	Koordinasi antar lembaga pengelola PTSP	Penyelenggaraan rapat koordinasi antar lembaga yang terkait dengan perizinan penanaman modal guna menyatukan langkah dan kebijakan serta evaluasi pelayanan prima PTSP
	Lokakarya mekanisme Perizinan Terpadu Satu Pintu	Pelaksanaan lokakarya mekanisme PTSP bagi lembaga dan stakeholder penanaman modal dalam upaya menyusun Standar Operasional Prosedur dalam Pelayanan PTSP
	Pembentukan sistem informasi data base PTSP	Pengadaan sistem informasi perizinan penananam modal yang dapat terintegrasi informasinya dengan instansi yang terkait
	Pengadaan sarana pengaduan pelayanan PTSP	Penyiapan kotak saran dan keluhan pelayanan serta penyiapan sistem pelayanan keluhan secara cepat
Penguatan sumber daya manusia yang terkait dalam pengelolaan PTSP	Pelatihan SDM dalam pengelolaan PTSP	Pelatihan yang dilakukan dalam upaya meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia dalam melakukan pelayanan prima penanaman modal
	Sosialisasi sistem pelayanan PTSP kepada seluruh stakeholder	Penyebarluasan informasi tentang mekanisme PTSP pada tingkat satuan dinas, pemerintah kecamatan dan pemerintah desa serta badan usaha

2. Optimalisasi sistem informasi potensi unggulan daerah

Program	Kegiatan	Keterangan
Penyiapan sistem informasi potensi unggulan daerah	Kajian potensi unggulan daerah	Penyusunan dokumen tentang potensi unggulan daerah yang akan menjadi bahan informasi bagi calon investor yang akan menanamkan modalnya di daerah
	Desain sistem informasi potensi daerah berbasis web	Menyusun desain sistem informasi potensi berbasis web guna penyebarluasan informasi dan aksesnya penanaman modal yang lebih luas
Pengelolaan Sistem Informasi Potensi Daerah	Pelatihan pengelolaan sistem informasi potensi daerah berbasis web	Peningkatan kemampuan sumber daya aparatur dalam mengelola dan memanfaatkan sistem informasi potensi daerah

3. Pengembangan UMKM berbasis potensi daerah

Program	Kegiatan	Keterangan
Menumbuh kembangkan UMKM berbasis potensi daerah	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	Pelatihan bagi calon wirausahaan baru UMKM berbasis potensi daerah
	Fasilitasi peningkatan akses keuangan bagi wirausaha baru	Memfasilitasi kelompok usaha bersama dengan lembaga keuangan
	Fasilitasi kemudahan formalisasi badan Usaha Kecil Menengah	Upaya yang dilakukan pemerintah untuk memberi kemudahan bagi UMKM dalam memenuhi persyaratan administratif usaha.
Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetatif usaha kecil menengah	Fasilitasi kemitraan UMKM dengan Usaha besar	Untuk meningkatkan kerjasama dan alih manajemen dan teknologi dalam memperkuat posisi UMKM
	Pengembangan sarana pemasaran produk Usaha Mikro Kecil Menengah	Upaya pemerintah untuk meningkatkan akses pasar bagi produk UMKM
	Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah	Upaya pemerintah membantu mengkomunikasikan produk usaha UMKM

4. Penguatan komunikasi/promosi potensi penanaman modal daerah

Program	Kegiatan	Keterangan
	Mengikuti pameran produk unggulan daerah	Mengikuti pameran yang diselenggarakan oleh daerah lain maupun program pameran produk unggulan oleh BKPM
	Promosi potensi produk unggulan daerah	Mempromosikan produk unggulan dan potensial, untuk menarik investasi
Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Mengikuti pameran investasi	Mengikuti pameran investasi yang diselenggarakan oleh BKPM maupun daerah lain, untuk menjaring minat investor
	Penyusunan buku <i>Project Prospectus Investasi Touna</i>	Menyediakan buku informasi yang berisi potensi daerah, daya tarik investasi, kebijakan dan kemudahan investasi di Touna
	Pengadaan billboard “Welcome to invest in Touna” di Bandara Ampana, Palu, dan Luwuk	Memberikan gambaran potensi investasi bagi para investor yang datang melalui pintu Ampana, Palu, dan Luwuk

5.4.2 Fase Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Energi

Fase kedua dalam penyusunan rencana umum penanaman modal daerah adalah fase menengah dengan rentang waktu 5 (lima) tahun. Fase ini menitik beratkan pada penguatan infrastruktur yang dimaksudkan untuk menyiapkan pengembangan investasi jangka panjang. Selain itu, pada fase ini difokuskan pada penguatan sumber energi yang dalam rangka mendukung industrialisasi skala besar dalam jangka panjang. Strategi daerah pada fase ini adalah :

1. Penyediaan infrastruktur pendukung investasi daerah
2. Optimalisasi pemanfaatan sumber energi terbarukan yang tersedia terutama bersumber dari air dan gas alam dalam menyediakan energi yang bersih dan ramah lingkungan.

Penjabaran strategi dalam bentuk program dan kegiatan pada fase ke dua ini dapat dilihat sebagai berikut:

1. Penyediaan infrastruktur pendukung investasi daerah.

Program	Kegiatan	Keterangan
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Perencanaan pembangunan prasaranan dan fasilitas perhubungan darat	Menyediaan masterplan pengembangan perhubungan darat.
	Peningkatan kualitas jalan menuju kantong produksi	Meningkatkan kelancaran angkutan dari kantong produksi ke pasar sasaran.
Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut	Perencanaan pembangunan prasaranan dan fasilitas perhubungan Laut	Menyediakan masterplan pengembangan perhubungan laut.
	Perluasan pelabuhan dan terminal bongkar muat	Untuk meningkatkan kapasitas bongkar muat di pelabuhan ampapa tete sebagai terminal angkutan barang.
Peningkatan sarana dan prasarana telekomunikasi	Penguatan koordinasi penyediaan BTS pada beberapa Kecamatan	Meningkatan keterjangkauan jaringan komunikasi pada seluruh kecamatan
	Membangun kerjasama pemerintah swasta (KPS) dalam pengadaan BTS	Membangun pola kerjasama dalam pengadaan BTS yang didanai oleh pemda dan swasta

2. Optimalisasi pemanfaatan sumber energi

Program	Kegiatan	Keterangan
Pemetaan potensi sumber energi ramah lingkungan.	Studi kelayakan sumber energi Mikro Hidro	Studi kelayakan pemanfaatan air terjun di beberapa tempat sebagai sumber energi PLTMH.
	Studi kelayakan pemanfaatan sumber energi dari gas.	Studi kelayakan pemanfaatan energi gas di tanjung api sebagai sumber energi alternatif.
Pembinaan dan Pengembangan bidang Ketenagalistrikan	Koordinasi pembuatan PLTMH dengan kementerian ESDM bidang sumberdaya energi.	Mengupayakan terbangunnya PLTMH pada beberapa wilayah terisolir, serta menupayakan alternatif energi
	Koordinasi pembuatan jaringan gas dengan kementerian ESDM bidang sumberdaya energi.	Mengupayakan pemanfaatan sumber gas yang di hasilkan di wilayah Tanjung Api sebagai sumber energi alternatif

Program	Kegiatan	Keterangan
Peningkatan ketersediaan energi	Koordinasi penyediaan SPBU untuk transportasi laut.	Untuk mendorong tersedianya SPBU dalam memenuhi kebutuhan angkutan laut
	Koordinasi peningkatan ketersediaan energi listrik bagi industri.	Untuk meningkatkan ketersediaan listrik untuk memasok kebutuhan industry

5.4.3 Fase Pengembangan Industri Skala Besar

Fase pengembangan industri skala besar memerlukan infrastruktur produksi yang kuat serta ketersediaan energi yang mencukupi. Untuk itu, tercapainya fase ini sangat ditentukan oleh penguatan pada fase kedua, yang menyiapkan investasi prasarana industri dan dukungan energi bagi industri. Fase ini tercapai dalam waktu lebih dari 15 (lima belas) tahun. Strategi yang dapat dilakukan daerah dalam mencapai fase ini adalah :

1. Penyiapan kawasan industri yang mampu menampung berbagai industri, baik industri besar maupun UMKM
2. Mendesain sistem rantai nilai yang mendukung penguatan kluster industri berbasis pada keunggulan daerah (mengacu pada produk inti daerah)
3. Pengembangan sistem pendidikan yang menitikberatkan pada pengembangan kreativitas untuk mendukung tumbuhnya industri kreatif.

Penjabaran strategi dalam bentuk program dan kegiatan pada fase ke dua ini dapat dilihat sebagai berikut:

1. Penyiapan kawasan industri yang mampu menampung berbagai industri, baik industri besar maupun UMKM

Program	Kegiatan	Keterangan
Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar	Studi pemetaan tataruang kawasan industri Touna	Ditujukan untuk memetakan peruntukan kawasan industri yang paling ideal di Kabupaten Tojo Una-Una
	Penyusunan <i>Detail Enginering Design</i> (DED) kawasan industri Touna	Dokumen yang menggambarkan rancangan bangunan dan denah kawasan industri Touna
	Studi kelayakan ekonomi dan keuangan Kawasan Industri Touna	Analisis kelayakan secara finansial dan secara ekonomi pembangunan kawasan industri di Kabupaten Tojo

Program	Kegiatan	Keterangan
		Una-Una
	Analisis mengenai dampak Lingkungan (AMDAL) kawasan Industri Touna	Untuk menganalisis dampak yang akan ditimbulkan dari keberadaan kawasan industri
	Pembebasan lahan kawasan industri Touna	Pembebasan lahan yang akan digunakan sebagai kawasan industri Touna
	Pematangan Lahan kawasan	Penyiapan lahan kawasan untuk menjadi lahan siap bangun
Pembentukan organisasi pengelola kawasan	Koordinasi dengan Dewan Kawasan Industri Nasional	Koordinasi yang bertujuan menyamakan program dan arah tujuan pengembangan kawasan industri di tingkat pemerintah pusat dalam hal ini Dewan Kawasan
	Koordinasi antar instansi daerah dalam pembentukan organisasi pengelola kawasan industri	Koordinasi dengan beberapa instansi terkait dalam membentuk pengelola kawasan industri Touna
	Pembentukan struktur organisasi	Penyusunan dan penetapan personel yang terkait dengan pengelolaan kawasan industri Touna

2. Membangun rantai nilai untuk menciptakan keunggulan kompetitif masing-masing kluster industri

Program	Kegiatan	Keterangan
Penataan Struktur industri	Pemetaan kluster industri unggulan di Kabupaten Tojo Una-Una	Memetakan kekuatan produk yang akan dikembangkan untuk masing-masing jenis industri tiap wilayah kecamatan
	Desain pola hubungan pemasok bahan baku industri	Untuk meningkatkan efisiensi produksi dan distribusi bahan baku pada tiap sektor industri unggulan
	Penguatan sarana produksi (saprodi) pendukung sektor perkebunan	Koordinasi peningkatan ketersediaan pupuk, bibit unggul dan obat-obatan pendukung sektor perkebunan
	Penguatan sarana produksi (saprodi) pendukung sektor perikanan	Koordinasi penguatan sistem pembibitan (<i>heccery</i>), peralatan perangkat ikan dan keramba jaring apung
	Penguatan sarana produksi (saprodi) pendukung sektor pertanian	Koordinasi peningkatan ketersediaan pupuk, bibit unggul dan obat-obatan serta peralatan pasca panen

Program	Kegiatan	Keterangan
Pengembangan Sentra-sentra industry Potensial	Desain kebijakan pengurangan, keringanan atau pembebasan redistribusi angkutan hasil produksi kawasan industri	pendukung sektor pertanian Meningkatkan daya tarik penanaman modal melalui sistem angkutan yang efisien dalam kawasan industry
	Penyediaan pasar bersama produk UMKM di kawasan industri	Meningkatkan efisiensi dan capaian <i>economic to scale</i> bagi produk-produk UMKM di kawasan industry

3. Pengembangan sistem pendidikan yang menitikberatkan pada pengembangan kreativitas untuk mendukung tumbuhnya industri kreatif.

Program	Kegiatan	Keterangan
Peningkatan Kualifikasi Pendidikan dan Ketrampilan Tenaga Pendidik	Pemetaan kebutuhan SDM industri	Menentukan karakteristik kebutuhan akan keahlian dan ketrampilan bagi industry
	Desain pendidikan berorientasi industri	Untuk menentukan desain pendidikan yang memiliki keahlian yang dibutuhkan dunia industry
	Membangun kerjasama dunia pendidikan dan industri dalam menghasilkan kualitas SDM berorientasi industri	Meningkatkan <i>link and mach</i> antara dunia pendidikan dan bisnis serta menciptakan hubungan saling menguntungkan antar pendidikan dan dunia bisnis
	Pemetaan potensi industri kreatif yang akan dikembangkan	Mengidentifikasi karakteristik industri kreatif yang ada di Kabupaten Tojo Una-Una berdasarkan wilayah dan subsektor industrinya
	Koordinasi penyusunan model pendidikan berfokus kreativitas dan inovasi	Membangun kerjasama antara sektor industri dengan pendidikan untuk dapat menghasilkan SDM yang memiliki tingkat kreativitas dan daya inovasi yang tinggi
	Implementasi sekolah berorientasi pengembangan kreativitas dan inovasi	Pelaksanaan kurikulum berorientasi kreativitas pada jenjang pendidikan tertentu dan terus dikembangkan dan diperluas pada seluruh jenjang pendidikan

5.4.4 Fase Pengembangan Ekonomi Berbasis Pengetahuan.

Tahap terakhir dari pengembangan penanaman modal adalah pengembangan ekonomi berbasis pada *knowledge based*. Pengembangan ekonomi daerah yang mengacu pada konsep *knowledge based* didasarkan pada kekuatan sumberdaya manusia (*human capital*), daya inovasi, kekuatan teknologi serta insan kreatif. Dalam upaya mencapai fase ini, maka hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah adalah :

1. Penguatan teknologi informasi pada seluruh sektor pembangunan
2. Menumbuh kembangkan ekonomi berbasis inovasi dan kreatifitas

Penjabaran strategi dalam bentuk program dan kegiatan pada fase ke dua ini dapat dilihat sebagai berikut:

1. Penguatan teknologi informasi pada seluruh sektor pembangunan

Program	Kegiatan	Keterangan
Penyediaan teknologi informasi yang terintegrasi	Koordinasi rencana intregasi sistem informasi	Penyatuan visi tentang penyatuan sistem informasi antar stakeholder
	Pengadaan teknologi informasi yang terintegrasi seluruh sektor pemerintahan	Penyediaan jaringan dan sistem informasi yang terintegrasi pada masing-masing instansi dan sektor terkait.
	Pengadaan teknologi informasi yang terintegrasi antara pemerintah dengan sektor bisnis dan masyarakat	Penyediaan jaringan dan sistem informasi yang terintegrasi antara pemerintah dan sektor swasta.

2. Menumbuh kembangkan ekonomi berbasis inovasi dan kreatifitas

Program	Kegiatan	Keterangan
Pengembangan sumberdaya manusia kreatif	Redesign kurikulum pendidikan dengan kebutuhan pengembangan industri kreativitas & pembentukan <i>entrepreneurship</i>	Pembaharuan kurikulum pendidikan pada muatan lokal yang lebih mengedepankan kemampuan kreativitas anak didik
	Menyediakan sarana dan prasarana lembaga pendidikan yang mendukung pengembangan industri	Menyediakan peralatan pembelanjaran pendukung implementasi kurikulum berbasis kreativitas

	mendukung pengembangan industri kreativitas	berbasis kreativitas
Pengembangan teknologi	Menyediakan teknologi tepat guna pendukung industri kreatif	Menyediakan teknologi tepat guna yang pendukung implementasi kurikulum berbasis kreativitas
	Membangun <i>strategic partnership</i> dengan daerah yang sudah maju pada teknologi kreatif (technocreative)	Melakukan alih teknologi kreatif dari daerah yang telah maju di bidang teknologi kreatif

BAB VI PELAKSANAAN RUPM KABUPATEN TOJO UNA-UNA

I. Fase Pengembangan Penanaman Modal yang Relatif mudah dan Cepat Menghasilkan

Strategi	Program	Kegiatan	2016	2017	2018	2019	2020	Pelaksana
Optimalisasi penyelenggaraan PTSP	Penguatan kelembagaan PTSP	Koordinasi antar lembaga pengelola PTSP						Kantor Perizinan
		Lokakarya mekanisme Perizinan Terpadu Satu Atap						Kantor Perizinan
		Pembentukan sistem informasi data base PTSP						Kantor Perizinan
		Pengadaan sarana pengaduan pelayanan PTSP						Kantor Perizinan
	Penguatan sumber daya manusia yang terkait dalam pengelolaan PTSP	Pelatihan SDM dalam pengelolaan PTSP						Kantor Perizinan
		Sosialisasi sistem pelayanan PTSP kepada seluruh stakeholder						Kantor Perizinan
Optimalisasi sistem informasi potensi unggulan daerah	Penyiapan sistem informasi potensi unggulan daerah	Kajian potensi unggulan daerah						Bappeda dan PM
		Desain sistem informasi potensi daerah berbasis web						Bappeda dan PM
	Penyiapan sistem informasi potensi unggulan daerah	Pelatihan pengelolaan sistem informasi potensi daerah berbasis web						Bappeda dan PM
Pengembangan UMKM berbasis potensi daerah	Menumbuhkan kembangkan UMKM berbasis potensi daerah	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan						Diskumperidag
		Fasilitasi peningkatan akses keuangan bagi wirausaha baru						Diskumperidag

Strategi	Program	Kegiatan	2016	2017	2018	2019	2020	Pelaksana
	Penguatan daya saing UMKM	Fasilitasi kemudahan formalisasi badan Usaha Kecil Menengah						
		Fasilitasi kemitraan UMKM dengan Usaha besar						
		Pengembangan sarana pemasaran produk Usaha Mikro Kecil Menengah						Diskumperid ag
		Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah						Diskumperid ag
Penguatan komunikasi/ promosi potensi penanaman modal daerah		Mengikuti pameran produk unggulan daerah						Diskumperid ag
		Promosi potensi produk unggulan daerah						Diskumperid ag
	Penguatan citra daerah sebagai tujuan penanaman modal	Mengikuti pameran investasi						Diskumperid ag
		Penyusunan buku <i>Project Prospectus Investasi Touna</i>						Bappeda dan PM
		Pengadaan billboard "Welcome to invest in Touna" di Bandara Ampana, Palu, dan Luwuk						Bappeda dan PM

2. Fase Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Energi

Strategi	Program	Kegiatan	2021	2022	2023	2024	2025	Pelaksana
Penyediaan infrastruktur pendukung investasi daerah	Peningkatan kualitas prasarana transportasi darat	Perencanaan pembangunan prasaranan dan fasilitas perhubungan darat						Perhubungan PU
		Peningkatan kualitas jalan menuju kantong produksi						Perhubungan PU
	Peningkatan kualitas prasarana transportasi laut	Perencanaan pembangunan prasaranan dan fasilitas perhubungan Laut						Perhubungan PU
		Perluasan pelabuhan dan terminal bongkar muat						Perhubungan PU
	Peningkatan sarana dan prasarana telekomunikasi	Penguatan koordinasi penyediaan BTS pada beberapa Kecamatan						Perhubungan
		Membangun kerjasama pemerintah swasta (KPS) dalam pengadaan BTS						Perhubungan
Optimalisasi pemanfaatan sumber energi	Pemetaan potensi sumber energi ramah	Studi kelayakan sumber energi Mikro Hidro						Pertambangan

Strategi	Program	Kegiatan	2021	2022	2023	2024	2025	Pelaksana
	lingkungan.	Studi kelayakan pemanfaatan sumber energi dari gas.						Pertambangan
	Pemanfaatan sumber energi ramah lingkungan sebagai sumber energi alternatif	Koordinasi pembuatan PLTMH dengan kementerian ESDM bidang sumberdaya energi.						Pertambangan
		Koordinasi pembuatan jaringan gas dengan kementerian ESDM bidang sumberdaya energi.						Pertambangan
	Peningkatan ketersediaan energi	Koordinasi penyediaan SPBU untuk transportasi laut.						Pertambangan
		Koordinasi peningkatan ketersediaan energi listrik bagi industri.						Pertambangan

3. Fase Pengembangan Industri Skala Besar

Strategi	Program	Kegiatan	2021	2022	2023	2024	2025	Pelaksana
Penyiapan kawasan industri yang mampu menampung berbagai industri, baik industri besar maupun UMKM	Penyiapan Kawasan industri Kabupaten Tojo Una-Una	Studi pemetaan tataruang kawasan industri Touna						Diskumperidag
		Penyusunan <i>Detail Engineering Design</i> (DED) kawasan industri Touna						Diskumperidag
		Studi kelayakan ekonomi dan keuangan Kawasan Industri Touna						Diskumperidag
		Analisis mengenai dampak Lingkungan (AMDAL) kawasan Industri Touna						Diskumperidag
		Pembebasan lahan kawasan industri Touna						Pemda
		Pematangan Lahan kawasan						PU
	Pembentukan organisasi pengelola kawasan	Koordinasi dengan Dewan Kawasan Industri Nasional						Diskumperidag
		Koordinasi antar instansi daerah dalam pembentukan organisasi pengelola kawasan industri						Diskumperidag
		Pembentukan struktur organisasi						Pemda
	Penataan Struktur Industri	Pemetaan cluster industri unggulan di Kabupaten Tojo Una-Una						Diskumperidag
Mendesain sistem rantai nilai yang mendukung penguatan cluster industri berbasis pada		Desain pola hubungan pemasok bahan baku industri						Diskumperidag

Strategi	Program	Kegiatan	2021	2022	2023	2024	2025	Pelaksana
keunggulan daerah (mengacu pada produk inti daerah)		Penguatan sarana produksi (saprodi) pendukung sektor perkebunan						Pertanian
		Penguatan sarana produksi (saprodi) pendukung sektor perikanan						Perikanan
		Penguatan sarana produksi (saprodi) pendukung sektor pertanian						Pertanian
	Pengembangan Sentra Industri Potensial	Desain kebijakan pengurangan, keringanan atau pembebasan restribusi angkutan hasil produksi kawasan industri						Dikumperidag
		Penyediaan pasar bersama produk UMKM di kawasan industri						Dikumperidag
Pengembangan sistem pendidikan yang menitikberatkan pada pengembangan kreativitas untuk mendukung tumbuhnya industri kreatif.	Peningkatan Kualifikasi Pendidikan dan Ketrampilan Tenaga Pendidik	Pemetaan kebutuhan SDM industri						Dikumperidag
		Desain pendidikan berorientasi industri						Dikumperidag Dikjar
		Membangun kerjasama dunia pendidikan dan industri dalam menghasilkan kualitas SDM berorientasi industri						Dikumperidag Dikjar
	Pengembangan SDM inovatif dan kreatif	Pemetaan potensi industri kreatif yang akan dikembangkan						Dikumperidag
		Koordinasi penyusunan model pendidikan berfokus kreativitas dan inovasi						Dikumperidag Dikjar
		Implementasi sekolah berorientasi pengembangan kreativitas dan inovasi						Dikumperidag Dikjar

4.Fase Pengembangan Ekonomi Berbasis Pengetahuan.

Strategi	Program	Kegiatan	2016	2017	2018	2019	2020	Pelaksana
Penguatan teknologi informasi pada seluruh sektor pembangunan	Penyediaan teknologi informasi yang terintegrasi	Koordinasi rencana intregasi sistem informasi						Perhubungan
		Pengadaan teknologi informasi yang terintegrasi seluruh sektor pemerintahan						Perhubungan

		Pengadaan teknologi informasi yang terintegrasi antara pemerintah dengan sektor bisnis dan masyarakat						Perhubungan
Menumbuh kembangkan ekonomi berbasis inovasi dan kreatifitas	Pengembangan sumberdaya manusia kreatif	Redesign kurikulum pendidikan dengan kebutuhan pengembangan industri kreativitas & pembentukan <i>entrepreneurship</i>						Dikjar
		Menyediakan sarana dan prasarana lembaga pendidikan yang mendukung pengembangan industri kreativitas						Dikjar
	Pengembangan teknologi	Menyediakan teknologi tepat guna pendukung industri kreatif						Diskumperid ag Dikjar
		Membangun strategic partnership dengan daerah yang sudah maju pada teknologi kreatif (technocreative)						Diskumperid ag

BAB VII

PENUTUP

RUPM Kabupaten Tojo Una-Una merupakan dokumen perencanaan yang bersifat jangka panjang sampai dengan Tahun 2025. RUPM Kabupaten Tojo Una-Una berfungsi untuk mensinergikan dan mengoperasionalkan seluruh kepentingan sektoral terkait, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas sektor-sektor yang akan dikembangkan sebagai prioritas penanaman modal di Tojo Una-Una.

Penyusunan RUPM Kabupaten Tojo Una-Una dimaksudkan untuk menyediakan panduan untuk mendorong kapitalisasi modal yang berkelanjutan dan melahirkan kelembagaan ekonomi yang kuat.

Lebih lanjut, RUPM Kabupaten Tojo Una-Una memberi gambaran umum tentang arah pembangunan ekonomi Kabupaten Tojo Una-Una dengan mengedepankan potensi ekonomi utama yang dapat dikembangkan. Perlu pengembangan sektor-sektor strategis serta pembangunan infrastruktur yang memadai dan menyeluruh di Kabupaten Tojo Una-Una. RUPM Kabupaten Tojo Una-Una dapat menjadi panduan umum bagi tidak saja pengembangan ekonomi sektoral untuk penanaman modal swasta, melainkan juga untuk pembangunan sektor-sektor lain yang terkait.

Keberadaan RUPM Kabupaten Tojo Una-Una yang bersifat jangka panjang berfungsi sebagai dokumen pelengkap dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tojo Una-Una dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tojo Una-Una.

BUPATI TOJO UNA-UNA,



MOHAMMAD LAHAY